

**PENGARUH ILO TERHADAP
PERKEMBANGAN PERBURUHAN JEPANG
SEBELUM PERANG DUNIA II**



SKRIPSI

DION CHRISTY

0704080167

**PROGRAM STUDI JEPANG
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
UNIVERSITAS INDONESIA**

DEPOK

2008



**PENGARUH ILO TERHADAP
PERKEMBANGAN PERBURUHAN JEPANG
SEBELUM PERANG DUNIA II**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi
persyaratan mencapai gelar
Sarjana Humaniora**

**DION CHRISTY
0704080167**

**KEKHUSUSAN SEJARAH
PROGRAM STUDI JEPANG
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
2008**

Skripsi ini telah diujikan pada hari Senin, 7 Juli 2008.

PANITIA UJIAN

Ketua

Pembimbing

Darsimah Mandah, M.A.

Prof. Dr. I Ketut Surajaya, M.A.

Sekretaris/Pembaca II

Pembaca I

Ansar Anwar, S.S.

M. Mossadeq Bahri, M. Phil.

Disahkan pada hari, tanggal oleh:

Koordinator Program Studi Jepang

Dekan

Jonnie Rasmada Hutabarat, M.A.

Dr. Bambang Wibawarta, M.A.

Depok, 7 Juli 2008

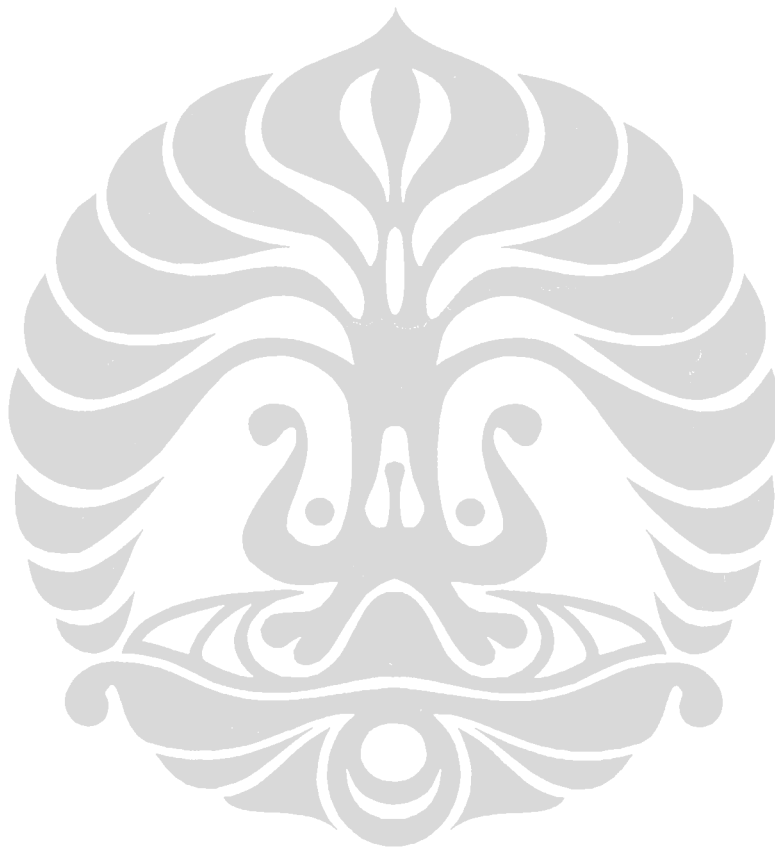
Seluruh isi skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis

Depok, 7 Juli 2008

Penulis

Dion Christy

NPM : 0704080167



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Humaniora Program Studi Jepang pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Ketut Surajaya, M.A. selaku pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran di dalam mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini. Maaf karena selama ini sudah banyak menyusahkan.
2. Mama, Opa, Oma, Leonardo, Nadya dan seluruh keluarga yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan selama perkuliahan dan penyusunan skripsi. Untuk Papa (alm.) yang tidak dapat berbagi kebahagiaan saya ini (I hope you're proud of me). Terima kasih juga untuk Mauritz, Bianca, Murley, dan Kelly yang disela-sela kegiatannya nun jauh disana selalu ingat untuk memberikan dukungan dan semangat.
3. Para penguji skripsi: Ibu Darsimah Mandah, M.A., Bapak M. Mossadeq Bahri, M. Phil., dan Ibu Ansar Anwar, S.S. yang telah banyak memberikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini. Terima kasih juga untuk Koordinator Program Studi Jepang, Bapak Jonnie Rasmada Hutabarat, M.A. yang telah banyak direpotkan selama pengurusan skripsi dan sidang penulis. Penulis juga berterima kasih untuk Pembimbing Akademik, Dr. Siti Dahsiar Anwar dan seluruh staff pengajar Program Studi Jepang atas bantuan dan bimbingan yang telah diterima penulis selama 4 tahun perkuliahan.

4. Untuk teman-teman angkatan 2004 Program Studi Jepang, akhirnya saya lulus! Untuk Etas, Ade, Puteri 'Oneng', Destin, Gichil, Hara, Himmi, Hana, Dini, Tita, dan Dennis semoga sukses ya dengan skripsinya. Thanx untuk Reino, Anggi, Dicky, Erika, Dennis, dan Eel buat semua pinjaman film, dorama, dan novel serta mp3 yang sangat 'menyegarkan' di masa penulisan skripsi. Untuk semua temen-temen '04: Dicky, Etas, Rahma 'Baygon', Reino, Frida 'Rongi', Ade, Oneng, Putie, Eel, Anggi, Angga, Destin, Gichil, Ellis, Meri, Erika, Chibi, Chabel, Hara, Noneng, Dimar, Ufi, Himmi, Widi, Aryo, Rori, Ajeng, Uzi, Santi, Nuru, Ana, Inge, Rinita, Hana, Gipoe, Elysia, Dini, Ami, Tita, Mita, Dennis dan Gibi; terima kasih ya untuk semua dukungan dan bantuannya selama ini. Maaf selama ini telah menyusahkan, terutama bagi kelas A untuk u-know-what-n-when. This last 4 years together had been a fun and memorable expirience for me. Hopefully our friendship could last for a long-long time. Keep in touch and don't be a stranger!
5. Untuk Epika dan saki, thanx ya buat dvd House dan mp3-nya. Terima kasih juga untuk Puto atas masukannya dalam penulisan skripsi saya. Untuk Saki, Puto, Okta, Marjo, Reza, Nisa, dan Dian yang juga telah berjuang bersama-sama untuk 'lolos' dari skripsi. Untuk Nungky, semangat ya!
6. Rm. Bagar OFMcap. Dan Rm. Giovanni OFMcap. yang selama ini telah memberikan doa dan dorongan sehingga saya mampu menyelesaikan studi.
7. Lastly, but one of the most important person in my life: Natalia Venny Rista Herdianti. Terima kasih ya atas segala dukungan, bantuan dan masukannya selama ini. Thanx for never giving up on me and always there when I needed. I U

Jakarta, 7 Juli 2008

Penulis

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dion Christy
NPM : 0704080167
Program Studi : Jepang
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Pengaruh ILO Terhadap Perkembangan Perburuhan Jepang Sebelum Perang Dunia II" beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok
Pada Tanggal : 7 Juli 2008
Yang menyatakan

Dion Christy

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Lembar Pernyataan	iii
Ucapan Terima Kasih	iv
Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah untuk Kepentingan Akademis	vi
Abstract	vii
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Bab I: Pendahuluan	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Ruang Lingkup	3
1.5 Kerangka Konsep	4
1.6 Metode Penelitian	6
1.7 Sistematika Penulisan	7
Bab II: Jepang di Masa Modern	8
2.1 Perkembangan Politik di Zaman Meiji Hingga Awal Showa	8
2.2 Revolusi Industri Jepang	12
2.3 Masalah Sosial (<i>Shakai Mondai</i>)	16
2.4 Kebijakan Pemerintah & Pengaruh Kalangan Pengusaha	19

Bab III: Gerakan Buruh Jepang	26
3.1 Sejarah Gerakan Buruh di Jepang	26
3.2 Represi Pemerintah dan Akibatnya	30
3.3 Kelahiran Kembali Gerakan Buruh Jepang	37
3.4 Radikalisme dan Perpecahan Dalam Gerakan Buruh	40
Bab IV: Pengaruh ILO di Jepang	44
4.1 Sejarah ILO dan Sikap Buruh Jepang Terhadap ILO	44
4.2 Jepang & ILO	45
4.3 Usaha Mengubah Kebijakan Pemerintah Jepang Melalui Pengaruh ILO	45
4.4 Pengaruh ILO Terhadap Perburuhan di Jepang	49
4.4.1 Perkembangan Hukum Mengenai Perburuhan	50
4.4.2 Pengaruh ILO Terhadap Administrasi Buruh di Jepang	52
4.5 Perkembangan Perburuhan Selanjutnya Hingga Sebelum Perang Pasifik	53
Bab V: Kesimpulan	59
Daftar Pustaka	62
Daftar Istilah	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah buruh industri berdasarkan industri, 1900-1914	14
Tabel 2.2 Upah harian bagi tukang dan pekerja, 1885-1892	16
Tabel 3.1: Perkembangan <i>Tekko Kumiai</i> , 1897-1898	28
Tabel 3.2: Mogok Kerja, 1897-1898	29
Tabel 3.3: Penangkapan terkait mogok kerja di bawah Pasal 17 UU <i>Chian Keisatsu Ho</i> dan tuduhan lainnya, 1914-1926	34
Tabel 3.4: Konflik Buruh Pada akhir Zaman Meiji	35
Tabel 3.5: Konflik Buruh Pada Zaman Taisho	39
Tabel 3.6: Konflik Buruh dan Serikat Buruh	42
Diagram 4.1: Struktur administrasi buruh di pemerintah pusat	53
Tabel 4.1: Kekuatan Serikat Buruh dan Konflik Buruh (1931-1944)	54

ABSTRAK

Nama : Dion Christy
Pembimbing : Prof. Dr. I Ketut Surajaya, M.A.
Judul : Pengaruh ILO Terhadap Perkembangan Perburuhan Jepang
Sebelum Perang Dunia II

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ILO mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan perburuhan di Jepang sebelum Perang Dunia II. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber-sumber data sekunder. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Dalam penulisannya, penelitian ini menggunakan pendekatan sinkronis yang tidak selalu berdasarkan kronologi waktu.

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mulai dari periode Meiji hingga awal periode Showa, sebelum Jepang mengambil peran dalam Perang Dunia II (1939-1945). Tepatnya dimulai sejak tahun 1868 hingga 1941, sebelum Perang Pasifik (1941-1945). Walaupun ILO sendiri baru resmi berdiri pada tahun 1919 setelah Perang Dunia I, namun sangatlah penting untuk terlebih dahulu melihat keadaan perburuhan di Jepang sebelumnya sebagai bahan perbandingan. Dengan demikian dapat diketahui apakah ILO mempunyai pengaruh positif dalam perkembangan perburuhan di Jepang.

Dapat disimpulkan berdasarkan uraian dan analisa dalam penelitian ini bahwa keberadaan ILO turut memberikan pengaruh terhadap perkembangan positif perburuhan di Jepang sebelum Perang Dunia II. Dengan wakil buruh Jepang untuk konferensi ILO yang dipilih dari serikat-serikat buruh, pemerintah Jepang sudah mengakui keberadaan serikat-serikat buruh yang sebelumnya selalu ia represi. Selain itu, sesuai dengan konvensi ILO, pemerintah juga mulai meratifikasi legislasi-legislasi yang berhubungan dengan perburuhan serta menata administrasi perburuhan sehingga menjadi lebih terstruktur dan efisien. Hal ini turut membantu pemerintah dalam menekan radikalisme buruh. Lambat laun pemerintah Jepang mulai mentoleransi kepentingan para buruh dan menyadari bahwa perbaikan keadaan buruh pada akhirnya demi kemajuan perekonomian dan kepentingan negara.

ABSTRACT

Name : Dion Christy
Counselor : Prof. Dr. I Ketut Surajaya, M.A.
Title : The Influence of ILO in Japan's Labor Development Before World War II

The objective of this study is to ascertain whether if the International Labor Organization (ILO) contributed a positive influence in Japan's labor development before World War II. This is a literature study, based on secondary data sources. The study's method is analytical descriptive. Furthermore, this study is using a synchronic approach which is not always based on a time chronology.

The scope of this study starts from the Meiji period until the early period of Showa, before Japan played a part in World War II (1939-1945). The precise date starts from year 1868 until 1941, before Pacific War (1941-1945). Although the ILO itself only had been founded in 1919, after World War I, it is very important to begin with studying the labor condition prior to 1919 as a comparative component. Therefore, the influence of ILO to the Japan's labor development could be assess.

Based on the description and analysis in this study, it could be concluded that the ILO existence had an influence to the positive development of labor in prewar Japan. With the labor representative for ILO conference chosen from trade unions, the Japanese government had acknowledged the existence of trade unions whom before were repressed. Moreover, in accordance to the ILO convention, the government also ratified the labor legislations and made a structured and efficient labor administration. In doing so the government could contain the labor's radicalism to a minimum. Slowly the Japanese government could tolerate the labor's concern and realized that improving the labor's condition would eventually benefit the economy and the nations interest

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Buruh merupakan fondasi bagi perkembangan industri serta perkembangan suatu negara pada umumnya. George Gunton mengemukakan dalam bukunya yang berjudul *Wealth and Progress* (1887) bahwa:

Penghasilan yang lebih tinggi bagi buruh akan mendorong para kapitalis untuk memperhatikan kondisi kerja buruh sehingga buruh pun akan menjadi lebih produktif. Selain itu, penghasilan yang lebih tinggi bagi buruh akan memungkinkan terjadinya permintaan pasar dalam skala besar sehingga teknik produksi massal akan menjadi lebih ekonomis. Peningkatan gaji buruh secara bertahap sangat vital bagi permintaan pasar yang merupakan dasar bagi ekspansi industri (Marsland, 1989: 50).

Berdasarkan pemikiran itu Takano Fusataro, salah satu pelopor Gerakan Buruh Jepang, mengemukakan bahwa:

Gerakan buruh adalah langkah awal untuk memperbaiki kondisi kerja buruh; perbaikan kondisi kerja buruh akan meningkatkan taraf hidup; peningkatan taraf hidup turut meningkatkan konsumsi mereka; meningkatnya konsumsi buruh akan meningkatkan produksi, sedangkan produksi adalah basis bagi kesejahteraan suatu negara. Oleh karena itu, setiap usaha untuk memperbaiki kondisi buruh adalah demi kepentingan utama negara. Pemberian gaji yang lebih tinggi bagi buruh tidak hanya akan membuat buruh lebih sejahtera dan mempertahankan kondisi kesehatan buruh untuk kebutuhan jangka panjang kapitalisme, namun hal tersebut juga akan membuat negara menjadi makin makmur dan berkembang dengan meningkatnya permintaan pasar (Marsland, 1989: 51).

Jika melihat keadaan perburuhan di Jepang dewasa ini, akan ditemukan suatu *paradoks*. Secara *de facto*, buruh di Jepang dengan serikat buruhnya terlihat lemah karena keengganan para buruh untuk melakukan mogok kerja bila terjadi konflik, makin berkurangnya buruh yang termasuk dalam serikat buruh, dan terpecahnya serikat-serikat buruh karena perbedaan ideologi dan pandangan politik. Namun secara *de jure*, posisi mereka sangat kuat. Hak-hak buruh di Jepang sudah dijamin secara spesifik dalam Konstitusi dan Perundang-undangan Jepang. Kekuatan hukum buruh di Jepang bahkan dianggap lebih baik dibanding negara-negara maju lainnya di Barat. Dapat dikatakan bahwa keadaan *de facto* buruh Jepang yang lemah dikarenakan sudah terjaminnya hak-hak buruh secara *de jure* (Woodiwiss, 1992: 1).

Keadaan buruh di Jepang saat ini yang terjamin secara hukum tidak tercipta begitu saja. Otto-Kahn Freund (Woodiwiss, 1992: 16) menyatakan bahwa terdapat tiga tahapan dalam sejarah perkembangan sistem hukum perburuhan di sebagian besar negara, yaitu: 'represi', 'toleransi', dan 'pengakuan'. Sebelum tahun 1945, gerakan buruh di Jepang yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para buruh masih direpresi oleh pemerintah. Ketika Jepang pertama kali dihadapkan pada masalah buruh industri modern pada masa 1880an, mereka pun mengalami kesulitan untuk menemukan solusi yang tepat dalam menanganinya.

Demi memperoleh status sosial yang lebih tinggi, gerakan buruh yang masih baru muncul saat itu menantang kalangan yang berkuasa dan menuntut persamaan hak, pengakuan secara hukum terhadap serikat-serikat buruh, dan diperbolehkannya aksi mogok kerja. Seperti yang dialami negara-negara Maju di Barat sebelum Jepang, permasalahan buruh murni merupakan suatu masalah sosial (*Shakai Mondai*) sehingga pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan sistem paternalisme.

Barulah setelah pendudukan Jepang oleh Amerika Serikat, peningkatan taraf hidup para buruh di Jepang mulai didukung secara hukum. Namun, hal itupun terjadi karena inisiatif dari Amerika Serikat, yang menduduki Jepang setelah memenangi Perang Dunia II, dan diakui serta dilaksanakan dengan terpaksa oleh pemerintah Jepang.

1.2 Rumusan Masalah

Masa represi pemerintah terhadap buruh dari tahun 1868 hingga 1945 bukanlah berarti bahwa tidak ada sama sekali perkembangan kebijakan mengenai perburuhan menuju arah yang positif. Walaupun terus direpresi, gerakan buruh Jepang pada masa itu terus berusaha untuk menciptakan suatu perubahan bagi keadaan hidup mereka. Berdirinya International Labor Organization (ILO) pada tahun 1919 turut dianggap memberikan pengaruh bagi perkembangan perburuhan di Jepang. Bagaimana perkembangan kebijakan tentang perburuhan perburuhan di Jepang yang turut didorong oleh pengaruh ILO patut menjadi suatu bahan pembelajaran. Pengaruh ILO terhadap dinamika perburuhan di Jepang inilah yang hendak diangkat dalam skripsi ini.

Hal-hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Jepang tentang masalah perburuhan dan gerakan buruh yang berkembang sebelum ILO berdiri?
2. Mengapa Jepang sejak awal bersedia menjadi anggota ILO dan apa pengaruhnya terhadap kebijakan pemerintah Jepang?
3. Bagaimana perkembangan masalah perburuhan di Jepang semenjak ILO berdiri hingga sebelum Perang Dunia II?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa pengaruh yang diberikan ILO terhadap perkembangan perburuhan di Jepang sebelum Perang Dunia II.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mulai dari periode Meiji hingga awal periode Shōwa, sebelum Jepang mengambil peran dalam Perang Dunia II (1939-1945). Tepatnya dimulai sejak tahun 1868 hingga 1941, sebelum Perang

Pasifik (1941-1945). Walaupun ILO sendiri baru resmi berdiri pada tahun 1919 setelah Perang Dunia I, namun sangatlah penting untuk terlebih dahulu melihat kebijakan pemerintah Jepang mengenai buruh semenjak dimulainya modernisasi pada periode Meiji sebagai bahan perbandingan dengan kebijakan pemerintah mengenai buruh di Jepang setelah ILO berdiri. Dengan demikian dapat diketahui apakah ILO benar memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan perburuhan Jepang.

1.5 Kerangka Konsep

Untuk memahami dinamika perburuhan di Jepang sebelum Perang Dunia II, pertama-tama perlu dibahas kerangka konsep dalam penelitian ini berupa definisi dari istilah-istilah utama yang dipakai dalam penelitian ini yaitu: perburuhan, buruh, masalah perburuhan, masalah sosial, gerakan buruh, serikat buruh, pengusaha, dan kapitalis; agar setiap istilah dapat diinterpretasikan sama. Dengan demikian tidak akan timbul ambiguitas dalam mendefinisikan istilah-istilah yang dipakai dan dalam memahami apa yang dibahas dalam penelitian ini. Semua definisi istilah-istilah yang dipakai adalah berasal dari Kamus Bahasa Jepang *Daijisen* (Suzuki, 1995).

Perburuhan (*rōdō*) dapat didefinisikan menjadi dua yaitu:

- (1) Pekerjaan yang menggunakan badan (fisik). Bekerja menggunakan fisik dan intelektualitas demi mendapat penghasilan.
- (2) Kegiatan penuh usaha manusia yang bertujuan pada produksi. Kegiatan manusia dalam menciptakan peralatan hidup dan produksi yang berasal dari alam. Memakai tenaga fisik. (Suzuki, 1995: 2826).

Walaupun perburuhan sering dikaitkan dengan pekerjaan kasar dan hanya mengandalkan fisik, namun istilah ini juga memiliki makna yang lebih luas yaitu pekerjaan yang menggunakan fisik dan intelektualitas untuk mendapatkan penghasilan. Definisi yang lebih luas inilah yang akan digunakan dalam penulisan ini karena dinamika perburuhan Jepang pada masa itu juga dipengaruhi oleh para buruh yang memiliki keterampilan (*jukuren rōdō*) dan terdidik.

Sedangkan buruh (*rōdōsha*) didefinisikan sebagai "(1) Orang yang hidup dengan gaji dan upah sebagai tenaga kerja. (2) Orang yang mendapat penghasilan hidup dengan melakukan pekerjaan fisik." Berdasarkan definisi ini dapat disimpulkan bahwa istilah buruh hanya berlaku bagi orang-orang yang bekerja bagi orang lain untuk memperoleh upah. Profesi seperti petani dan nelayan yang bekerja untuk dirinya sendiri tidak dapat dimasukkan dalam kelompok buruh, namun buruh tani yang bekerja bagi tuan tanah atau petani kaya tentunya termasuk dalam definisi buruh. Definisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah definisi pertama karena lebih luas maknanya dan tidak hanya berlaku bagi buruh kasar (fisik) saja.

Perburuhan, seperti halnya bidang lain, juga memiliki permasalahan. Masalah perburuhan (*rōdō mondai*) didefinisikan sebagai: "berbagai masalah sosial yang timbul dari konfrontasi buruh dengan manajemen perusahaan di dalam masyarakat kapitalis." (Suzuki, 1995: 2826).

Oleh karena masalah perburuhan merupakan bagian dari masalah sosial, maka patut juga dibahas definisi dari masalah sosial. Masalah sosial (*shakai mondai*) adalah "segala masalah yang terjadi akibat ketimpangan sosial yang irasional sehingga menyulitkan kehidupan masyarakat." (Suzuki, 1995: 1230).

Menantang segala permasalahan tersebut muncul suatu gerakan oleh para buruh. Gerakan buruh (*rōdō undō*) menurut definisi *Daijisen* adalah "para buruh yang bersatu dan bergerak demi perbaikan status sosial dan keadaan buruh." (Suzuki, 1995: 2826).

Selanjutnya, para buruh akan bergerak secara kelompok dan membentuk serikat-serikat. Definisi dari serikat buruh (*rōdō kumiai*) adalah:

Para buruh yang berdasarkan inisiatif sendiri bersatu dan berorganisasi demi perbaikan status sosial serta untuk menjaga dan memperbaiki keadaan buruh. Bentuk strukturnya dapat berupa organisasi umum maupun organisasi yang dibentuk berdasarkan perusahaan, profesi, dan industri (Suzuki, 1995: 2826).

Dalam membahas masalah perburuhan pasti pihak pengusaha juga akan turut dibahas. Pengusaha (*kigyōka*) memiliki definisi sebagai "orang yang membangun perusahaan dan melakukan manajemen perusahaannya." (Suzuki, 1995: 629). Pada awal masa modern Jepang, pengusaha modern yang pertama-tama muncul adalah pengusaha yang bergerak di bidang industri.

Sementara itu, kapitalis (*shihonka*) adalah:

Orang yang menawarkan modal bagi perusahaan. Kapitalis dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya sebagai orang yang bertanggung jawab langsung atas manajemen; dan orang yang semata-mata hanya mendapatkan bagian dari keuntungan dan tak berhubungan secara langsung dengan manajemen (Suzuki, 1995: 1216).

Kapitalis di Jepang mulai berkembang pada awal abad ke 20 setelah Jepang mengalami ledakan ekonomi. Pada kesempatan tersebut para pengusaha Jepang mendapatkan momentum untuk meraih keuntungan besar sehingga memiliki modal untuk melakukan ekspansi bisnisnya dan kemudian bertransformasi menjadi kapitalis dengan modal yang kuat.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, yaitu mencari pengertian historis tentang permasalahan menggunakan data dokumen dari buku-buku dan artikel-artikel. Semua sumber pustaka yang digunakan merupakan sumber sekunder. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan sinkronis karena kejadian-kejadian sejarah yang dirangkum tidak selalu diurut berdasarkan kronologi waktu. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini menggunakan jenis penulisan deskriptif analitis, yaitu memberikan uraian mengenai permasalahan berdasarkan kumpulan data yang ada dan kemudian memberikan analisa berdasarkan uraian data tersebut.

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima (5) bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Dalam bab pendahuluan diuraikan latar belakang penulisan, masalah penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika.

Bab II: Jepang di Masa Modern. Pada bab ini akan diuraikan latar belakang jaman saat itu dimulai dari perkembangan politik Jepang pada jaman Meiji hingga awal jaman Shōwa (1868-1941), revolusi industri Jepang, masalah sosial yang timbul, serta kebijakan pemerintah menyangkut buruh dan pengaruh dari kalangan pengusaha.

Bab III: Gerakan Buruh Jepang. Bab ini membahas awal munculnya gerakan buruh di Jepang, represi pemerintah dan akibatnya, kelahiran kembali gerakan buruh Jepang, serta radikalisme dan perpecahan dalam gerakan buruh.

Bab IV: Pengaruh ILO di Jepang. Dalam bab ini, akan dibahas sejarah ILO, hubungan Jepang dengan ILO, usaha-usaha yang dilakukan untuk mengubah kebijakan pemerintah Jepang melalui ILO, pengaruh ILO terhadap perburuhan di Jepang mencakup bidang legislasi dan administrasi buruh, serta perkembangan perburuhan selanjutnya hingga sebelum Perang Dunia II.

Bab V: Kesimpulan. Pada bab ini akan diberikan kesimpulan berdasarkan uraian dan analisa yang telah diberikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

JEPANG DI MASA MODERN

Restorasi Meiji pada Tahun 1868, menandai dimulainya pemerintahan baru Jepang di bawah kekuasaan Kaisar Meiji. Berakhirlah pemerintahan feodal Jepang yang telah dikuasai oleh marga Tokugawa selama 265 tahun. Istilah “Restorasi Meiji” muncul karena dikembalikannya kekuasaan dan tugas untuk menjalankan pemerintahan kepada Kaisar (*Tennō*), seperti yang berlaku pada masa sebelum masa feodal.

Menurut Ayusawa (1976: 20), Restorasi Meiji tidak hanya terbatas pada perubahan di bidang politik saja, tapi juga di bidang sosial, budaya dan ideologi. Jatuhnya sistem pemerintahan feodal juga diikuti dengan mudarnya sistem ekonomi lama, hilangnya otoritas nilai-nilai etika yang absolut, ditinggalkan tradisi-tradisi lama yang sebelumnya dihormati, dan diterapkannya kebijakan baru oleh pemerintah dan masyarakat yang merupakan modernisasi menyeluruh bagi Jepang.

2.1 Perkembangan Politik di Zaman Meiji Hingga Awal Shōwa

Restorasi Meiji dimotori oleh kaum muda samurai dari strata bawah yang berasal dari klan Satsuma, Choshu, Tosa, dan Hizen. Demi mempertahankan supremasinya dalam menjalankan kebijakan-kebijakan dari pemerintahan baru, mereka memegang jabatan-jabatan yang penting dan strategis dalam pemerintahan dan melakukan sentralisasi kekuasaan. Sentralisasi kekuasaan tersebut termasuk menekan pemikiran-pemikiran liberal serta pembatasan terhadap gerakan-gerakan yang menuntut kebebasan sipil. Pemerintah merasa perlu menerapkan kebijakan otoriter yang absolut demi menekan gerakan-gerakan liberal yang timbul di kalangan masyarakat umum (Ayusawa, 1979: 26-27).

Ironisnya, pemikiran liberal yang berasal dari Barat tersebut diusung oleh kalangan progresif yang di dalamnya termasuk orang-orang yang gagal mendapatkan peran penting atau pekerjaan dalam pemerintahan baru walaupun mereka turut berperan dalam menjatuhkan pemerintahan *Bakufu* (keshogunan) Tokugawa. Mereka tidak puas dengan pembaharuan yang dilakukan pemerintah dan kebijakan-kebijakannya yang otoriter. Hal ini menimbulkan terjadinya pemberontakan di berbagai daerah di Jepang. Masalah yang paling menyulitkan adalah Pemberontakan Satsuma pada tahun 1877 di Kagoshima yang dipimpin Saigo Takamori, salah satu tokoh yang terkenal pada masa Restorasi. Dengan berhasil dipadamkannya pemberontakan tersebut, menandai berakhirnya perlawanan bersenjata pihak-pihak yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah. Sejak itu perlawanan bersenjata diganti dengan oposisi verbal.

Oleh karena pemerintahan yang baru dianggap tidak memperhatikan keinginan rakyat dan dimonopoli oleh kalangan bekas samurai yang menjatuhkan Tokugawa, mulai tahun 1880 muncul gerakan yang kuat untuk menuntut diakuinya Hak-Hak Sipil masyarakat oleh pemerintah. Adalah Itagaki Taisuke, seorang bekas samurai dari klan Tosa yang berperan dalam Restorasi Meiji tetapi tidak puas dengan pemerintahan yang baru, yang pertama kali memulai gerakan ini dengan memotori *Jiyū Minken Undō* (Gerakan Kebebasan dan Hak-hak sipil). Salah satu tuntutananya adalah agar pemerintah mendirikan Parlemen yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilu. Pada tahun 1881 akhirnya pemerintah mengumumkan bahwa Parlemen akan diselenggarakan pada tahun 1890 dan sebelumnya akan dibuat UUD (Konstitusi) yang mengatur jalannya pemerintahan. Pada tahun 1881 Itagaki Taisuke lalu mendirikan *Jiyūtō* (Partai Liberal). Karena makin banyaknya dukungan bagi Itagaki, pemerintah mencoba membujuknya dengan menawarkan posisi penting dalam kabinet dan akhirnya diterima oleh Itagaki. Dengan demikian *Jiyūtō* akhirnya pada tahun 1884 dibubarkan (Ayusawa, 1979: 28 dan Bowen, 1980: 1 dan 110-113).

Walau demikian pemikiran liberal tetap berkembang kuat di masyarakat Jepang. Kebijaksanaan modernisasi Jepang yang mendorong pengadopsian kebudayaan Barat sangat berperan dalam bertumbuh-kembangnya berbagai pemikiran Barat yang menimbulkan gerakan liberal serta keinginan untuk

mempunyai hak dan kebebasan. Salah satu tokoh penting dalam menyebarkan gagasan mengenai hak-hak asasi dan demokrasi di Jepang adalah Fukuzawa Yukichi yang menghasilkan banyak karya seperti *Gakumon no Susume* (Memajukan Ilmu Pengetahuan) dan *Tsuzoku Minken Ron* (Essay Mengenai Hak Asasi Manusia).

Pada awal zaman Meiji juga terdapat tokoh-tokoh yang berhaluan sosialis seperti Nakae Chomin, Sakai Yuzaburo dan Tokutomi Iichiro (Soho). Namun karena pada saat itu belum adanya kaum *borjuis* yang lahir karena sebuah revolusi industri, akumulasi kekayaan oleh kaum kapitalis, ketidakpuasan dari masyarakat kalangan bawah dan lahirnya kelas sosial *proletariat*, ideologi ini masih belum populer di Jepang. Pemikiran sosialisme yang menarik bagi kalangan intelektual di Jepang saat itu adalah Utopia daripada Marxis.

UUD Meiji atau *Dai Nippon Teikoku Kenpou* diumumkan pada tahun 1889. UUD ini memberikan wewenang yang besar kepada *Tennō* dalam menjalankan pemerintahan. Contohnya yaitu *Tennō* sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, memiliki hak untuk menggerakkan militer tanpa melalui ijin Parlemen, menghentikan atau memperpanjang Sidang Majelis Nasional, hak veto dalam perubahan UUD. Selain itu pihak penguasa juga memiliki kekuasaan luas dalam melakukan sensor dan penegakkan hukum. Walaupun sudah ditetapkan dibentuknya Parlemen yang terdiri atas Majelis Tinggi (*Kizoku In*) dan Majelis Rendah (*Shūgi In*), tetapi hak dan wewenang mereka dibatasi begitu pun juga dengan hak rakyat biasa.

Kekuasaan *Tennō* dan pemerintah yang begitu besar serta dibatasinya hak Parlemen dan rakyat bertujuan untuk memperkokoh kesatuan nasional yang baru saja dijalin setelah Restorasi Meiji dan untuk mengantisipasi ancaman kekacauan sosial seperti yang terjadi di negara-negara Barat karena perkembangan ekonomi yang berbasis industri.

Pada tahun 1912, Kaisar Meiji meninggal dunia dan digantikan oleh Kaisar Taishō. Periode Taishō (1912-1926) ditandai dengan munculnya pemerintahan yang berasal dari partai politik, meningkatnya peranan masyarakat di bidang politik, tumbuhnya gerakan buruh yang terorganisir dan gerakan sayap

kiri, serta ledakan ekonomi yang disebabkan oleh Perang Dunia I. Kecenderungan periode ini yang demokratis, yang seringkali disebut sebagai “Demokrasi Taishō”, didukung dengan lahirnya kelas menengah masyarakat urban yang terdidik dan munculnya bentuk-bentuk baru media massa seperti radio, surat-surat kabar dengan sirkulasi yang luas, majalah-majalah, dan buku-buku dari percetakan. Tidak seperti sebelumnya, kabinet-kabinet dibentuk oleh partai-partai yang memperoleh mayoritas suara di Parlemen. Pada masa itu, berbagai Hukum perundang-undangan yang mendukung demokrasi, dan hak-hak sipil bagi masyarakat Jepang dibentuk dan ditetapkan. Namun, sayangnya, jatuhnya perekonomian dan tindakan-tindakan pemerintah yang otoriter mulai mengikis sedikit demi sedikit eksperimen pertama Jepang terhadap demokrasi.

Bentuk kapitalisme Jepang menjadi perdebatan penting pada masa 1920an karena pengaruh dari suksesnya *Revolusi Bolshevik* di Rusia yang membuka dimensi baru bagi pilihan sistem sosial di seluruh dunia. “Menurut teori pentahapan sejarah Marxis, marxisme adalah sistem sosial yang timbul sebagai hasil perkembangan dan metamorfosis dari kapitalisme borjuis, serta merupakan sistem yang lebih unggul dibandingkan pendahulunya” (Sumiya, 1979: 269). Partai Komunis Jepang, yang berdiri pada tahun 1922, menganggap bahwa kapitalisme di Jepang pun pada akhirnya akan mencapai tahap yang akan memulai revolusi peralihan menuju sosialisme dan komunisme. Namun selama dekade 1920an dan 1930an sosialisme dan komunisme di Jepang terus direpresi oleh pemerintah dan para aktivisnya dipenjarakan.

Periode Shōwa (1926-1989) yang dimulai setelah berakhirnya periode Taishō merupakan salah satu masa yang penuh kekacauan dalam sejarah Jepang. Pada dekade pertama periode ini, koalisi ultranasionalis dari politisi sayap kanan dan perwira-perwira militer meraih kontrol kekuasaan negara. Pemerintah pada masa itu melakukan politik represi dan mulai mengambil kebijakan untuk melakukan ekspansi militer Jepang di benua Asia yang puncaknya adalah dengan dimulainya perang Cina-Jepang (1937) dan berlanjut dengan Perang Pasifik tahun 1941 yang merupakan bagian dari Perang Dunia II (1939-1945).

2.2 Revolusi Industri Jepang

Pada awal periode Meiji, pemerintah Jepang mengeluarkan slogan-slogan nasional seperti *Bunmei Kaika* (Peradaban dan Pencerahan), *Fukoku Kyōhei* (Negara Kaya, Militer Kuat), dan *Shokusan Kōgyō* (Ekspansi Industri dan Mengembangkan Ekonomi). Slogan-slogan itu menjadi tanda dimulainya modernisasi Jepang. Pemuda-pemuda Jepang dikirim ke berbagai negara di Barat untuk mempelajari teknologi, ilmu hukum, ilmu politik, ilmu kedokteran dan lain sebagainya. Sementara itu, berbagai ahli dan tokoh intelektual dari Barat didatangkan ke Jepang untuk dipekerjakan sebagai tenaga pengajar dan konsultan. Dengan demikian Jepang mulai mengimplementasikan alih teknologi, pendidikan dan kelembagaan modern.

Sebenarnya slogan-slogan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang adalah bagian dari kebijakan jangka panjang Jepang untuk mengejar kemajuan negara-negara Barat. Pada masa tersebut negara-negara Barat yang maju menganut ideologi *Imperialisme* dan *Kolonialisme* sehingga negara-negara di Asia dan Afrika yang belum maju dijajah oleh negara-negara Barat. Untuk menghadapi keadaan politik internasional saat itu yang bersifat *predatory* (ganas, agresif) dan mempertahankan kemerdekaan Jepang, diperlukan kekuatan militer dan ekonomi yang kuat disertai dengan rasa nasionalisme yang tinggi.

Salah satu pengaruh modernisasi di Jepang adalah lahirnya Revolusi Industri Jepang. Revolusi ini secara signifikan mengubah kehidupan masyarakat Jepang dalam waktu yang relatif singkat bila dibanding dengan revolusi industri di Eropa. Revolusi industri melahirkan kelas buruh dalam struktur masyarakat dan memaksa pemerintah untuk membuat kebijakan baru untuk mengatur perburuhan di Jepang.

Revolusi Industri adalah suatu fenomena yang pertama kali timbul di Inggris pada akhir abad ke 18. Hal ini menandai penggunaan mesin-mesin dan tenaga buatan yang baru, penggunaan modal yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya, dan pengumpulan tenaga kerja (buruh) dalam penciptaan industri-industri yang kemudian berkembang makin besar. Revolusi Industri yang terjadi di Jepang seratus tahun kemudian juga tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi

di Inggris. Akan tetapi, berbeda dengan Revolusi Industri Inggris, Revolusi Industri yang terjadi di Jepang timbul sebagai akibat dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Motivasi utama dalam Revolusi Industri Jepang adalah keinginan untuk memajukan industri nasional sesuai dengan slogan-slogan nasional seperti *Fukoku Kyōhei*. Sedangkan Revolusi Industri Inggris pada awalnya bersifat individual (swasta) (Ayusawa, 1976: 39).

Walaupun secara politis pemerintah Jepang menganut sistem ekonomi liberal, industri-industri utama dimulai dan dijalankan oleh pemerintah karena keadaan depresi ekonomi nasional. Kebijakan ini juga diterapkan pemerintah untuk menghindari ketergantungan terhadap pinjaman asing. Kebijakan ini berlanjut selama 14 tahun dan selama itu pemerintah memiliki dan menjalankan berbagai industri seperti manufaktur senjata, galangan kapal, kereta api, batu bara dan pertambangan lainnya, tekstil, kertas dan manufaktur kaca. Setelah perusahaan-perusahaan swasta sudah dapat berkembang dengan mapan, pemerintah mulai melepas industri-industri yang dipegangnya. Namun, perusahaan-perusahaan swasta tersebut masih diawasi, dikontrol, dilindungi dan disubsidi oleh pemerintah hingga pada waktu Jepang berperang dengan Cina (1894-1895).

Jepang pada awalnya merupakan masyarakat agraris dengan populasi yang bekerja 80% diantaranya bekerja di bidang agrikultur, dan paling banyak hanya 5% di bidang manufaktur. Mekanisme pabrik-pabrik pertama kali meluas pada akhir dekade 1880an, tetapi secara mengejutkan 84% dari 8,612 perusahaan di Jepang pada tahun 1902 baru berdiri beberapa tahun setelah perang Cina-Jepang tahun 1894-1895 (Garon, 1987: 10).

Patut diketahui bahwa pada periode Meiji hingga Taishō, Jepang mengalami tiga peperangan dalam kurun waktu 24 tahun (1894-1918), dan pada ketiga perang tersebut Jepang berada di pihak pemenang. Kemenangan Jepang atas Cina (1894-1895) memberikan keuntungan bagi Jepang mencapai ¥ 400 juta, yang menyebabkan Jepang mengalami ledakan ekonomi. Semenjak itu, modal dana bagi industrialisasi Jepang meningkat dengan cepat tiap tahunnya. Setelah itu, kemenangan Jepang yang tak diduga dunia saat berperang melawan Rusia

(1904-1905), meningkatkan status Jepang di dunia internasional dan memberikan kesempatan lebih lanjut bagi Jepang untuk melakukan ekspansi industri.

Tahap akhir perkembangan fenomenal ekonomi Jepang saat itu, yang juga merupakan bagian akhir dari Revolusi Industrinya, dimulai saat Perang Dunia I (1914-1918). "Sementara negara-negara Eropa sibuk berperang, Jepang mengambil kesempatan untuk memenuhi permintaan pasar di Asia dan Afrika." (Ayusawa, 1976: 49). Bencana yang dialami Eropa karena Perang Dunia I ironisnya menjadi kesempatan emas bagi Jepang untuk melakukan ekspansi industri dan perdagangan. Indeks produksi naik dari 4.5 pada 1880 menjadi hampir 200 pada 1930, dan jumlah tenaga kerja industri meningkat dari kira-kira 400.000 orang di tahun 1895 menjadi hampir 3.000.000 di tahun 1930 (Okochi, 1973: 37)

Tabel 2.1 Jumlah buruh industri berdasarkan industri, 1900-1914 (dalam ribuan)

	1900	1907	1914
Tekstil	234	501	584
Mesin	30	67	108
Kimia	38	87	106
Makanan	25	95	96
Lain-lain	23	85	111
Industri Spesial	37	5	12
Total	388	842	1,018

Sumber: Tabel statistik pabrik, *Kōjō tōkeihyō* (Okochi, 1973: 40)

Keikutsertaan Jepang pada ketiga perang tersebut juga berakibat pada ekspansi besar-besaran tenaga kerja industri secara umum. Hal ini disertai juga dengan meningkat drastisnya jumlah buruh di industri yang berhubungan dengan militer dan industri pembuat peralatan (lihat tabel 2.1). Namun buruh di industri mesin hanya mewakili 8% dari jumlah buruh di Jepang tahun 1909 (Garon, 1987: 12). Tabel 2.1 memperlihatkan bahwa mayoritas buruh Jepang bekerja di industri tekstil sebelum Perang Dunia II. "Produk-produk sutera dan katun memberikan kontribusi 3 per 5 dari ekspor Jepang di tahun 1913." (Garon, 1987:12).

Walaupun demikian, perkembangan pesat dalam waktu yang singkat tersebut menimbulkan berbagai permasalahan yang menyulitkan. Produksi dengan menggunakan mesin dan teknologi Barat menyebabkan kerajinan tangan dan industri tradisional rakyat kalah bersaing dan makin menghilang, sedangkan penyebaran industri-industri modern berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Selain itu, Revolusi Industri juga menciptakan berbagai permasalahan sosial di kota-kota industri yang baru.

Kebijakan nasional yang mendorong perkembangan industri berat juga membuat pemerintah bertanggungjawab untuk sedapat mungkin melindungi industri-industri tersebut. Konsekuensinya, pemerintah hanya membebani industri dengan pajak yang ringan walaupun terdapat kebutuhan negara untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar. Adalah para petani yang menjadi korban dengan dibebankannya kepada mereka pajak yang lebih tinggi daripada industri. Tingginya pajak menyebabkan terjadinya penurunan petani yang memiliki tanah, munculnya tuan-tuan tanah, bertambahnya buruh tani, serta konsentrasi penduduk yang bertambah di daerah-daerah urban. Keinginan industri untuk memberikan upah seminimal mungkin bagi buruhnya juga turut mempersulit keadaan petani. Salah satu contoh akibat dari hal ini adalah kerusuhan buruh tani tahun 1875 di Yoki Mura, prefektur Gifu.

Di Inggris Revolusi Industri menyebabkan kelas menengah dapat meraih kekuatan politik dan kemakmuran, namun hal itu tak terjadi di Jepang. Walau transformasi Jepang dari negara agraris menjadi negara industri berlangsung dengan cepat, masih terdapat kebiasaan-kebiasaan dan pandangan-pandangan lama yang bertahan di masa Meiji. Hal itulah yang memperlambat kemunculan kesadaran kaum proletariat seperti di Inggris. Hal yang paling berpengaruh adalah etika-etika feodal yang masih dihormati oleh kalangan masyarakat Jepang seperti kejujuran, kerajinan, kesederhanaan, pengorbanan kepentingan pribadi demi kepentingan umum dan kepatuhan. Ide mengenai hak-hak dasar manusia seperti di negara-negara Barat masih asing bagi masyarakat Jepang saat itu (Ayusawa, 1976: 53 dan Woodiwiss, 1992: 29).

Kemajuan Industri Jepang yang fenomenal tak lepas dari kebijakan pemerintah. Industri-industri yang dimiliki dan dijalankan oleh pemerintah satu demi satu dijual kepada swasta dengan harga yang sangat rendah untuk mendorong pertumbuhan industri-industri swasta. Walau demikian, kemajuan industri masih terhambat dengan kurangnya sumber daya alam yang dimiliki Jepang sehingga tak sedikit bahan-bahan mentah yang harus diimpor. Tingginya harga bahan-bahan mentah yang diimpor oleh Jepang diimbangi dengan rendahnya upah buruh Jepang karena tingginya populasi penduduk. Rasa nasionalisme para buruh membuat mereka pada awalnya rela berkorban dengan penghasilan rendah, jam kerja yang panjang dan kondisi kerja yang memprihatinkan demi kepentingan dan kemajuan negara (Sugeno, 1992: 6). Hal inilah yang dieksploitasi oleh para pengusaha dan pemerintah Jepang.

Tabel 2.2 Upah harian bagi tukang dan pekerja, 1885-1892 (dalam sen)

	1885	1887	1892
Tukang Kayu	22.7	22.3	27.0
Tukang Plester	23.3	22.6	27.0
Pekerja Percetakan	19.8	21.9	22.0
Buruh Harian	15.7	16.0	18.4

Sumber: Buku Tahunan Statistik Kekaisaran, *Teikoku tōkei nenkan* (Okochi, 1973: 34)

Kebijakan *laissez-faire*, sistem pasar bebas, dalam kapitalisme yang didukung oleh banyak orang di kalangan pengusaha dan birokrat, merupakan sumber utama kemakmuran ekonomi di Barat. Akan tetapi, dalam konteks Jepang yang pada masa itu kurang memperhatikan hak-hak individu, kebijakan *laissez-faire* digunakan untuk mengeksploitasi buruh. Tidak adanya regulasi pemerintah yang melindungi buruh ditambah dengan keinginan para pengusaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin berakibat pada rendahnya penghasilan, jam kerja yang panjang, dan kondisi kerja yang tidak sehat bagi para buruh (Marsland, 1989: 49).

2.3 Masalah Sosial (*Shakai Mondai*)

Ayusawa (1976: 55) mengungkapkan bahwa terdapat empat tahap dalam evolusi permasalahan buruh. Tahap pertama adalah permasalahan yang terutama

bersifat humanitarian; pada tahap kedua permasalahan tersebut berubah menjadi bersifat sosial-ekonomi; permasalahan pada tahap ketiga terutama bersifat politis; dan pada tahap keempat terutama menyangkut ideologi.

Pertumbuhan ekonomi kapitalis secara mendadak tak luput membawa permasalahan-permasalahan sosial yang menimbulkan benih-benih ketidakpuasan dan protes di kalangan buruh. "Buruh pada zaman Meiji hingga Taishō sangat sedikit merasakan kemakmuran dari hasil Revolusi Industri dan ledakan ekonomi Jepang pada awal abad ke 20." (Silberman,1974: 306). Selain jam kerja panjang, penghasilan rendah dan kondisi kerja yang tidak sehat; masalah menyangkut banyaknya buruh wanita dan anak-anak, tidak adanya perlengkapan keamanan di tempat kerja yang layak, dan tempat penampungan buruh yang tidak sehat juga merupakan ciri industri Jepang saat itu.

Pemerintah mungkin akan terus menunda lebih lanjut pengajuan RUU Pabrik kalau bukan karena kesadaran yang mulai tumbuh bahwa masalah-masalah yang ada di kelas buruh, yang makin lama bertambah banyak populasinya di Jepang, lebih dari sekedar masalah ekonomi. Ketika birokrat-birokrat dan kalangan pengusaha terus menekankan pada usaha-usaha agar buruh dapat menolong dirinya sendiri dan perbaikan industrialisasi, makin banyak kaum intelektual yang memperingatkan "masalah sosial" yang makin mengancam setelah tahun 1890. Industrialisasi gaya Barat menurut mereka pada akhirnya akan berakibat pada timbulnya mogok-mogok kerja, serikat-serikat buruh, dan sebuah gerakan sosialisme seperti yang dialami Eropa dan Amerika. Semua itu terjadi karena kesadaran para buruh akan makin besarnya jurang kesenjangan antara kaya dan miskin.

Daerah kumuh, tanda yang paling jelas tentang adanya kesenjangan sosial, adalah hal yang mendorong terjadinya diskusi publik untuk pertama kali mengenai masalah sosial di Jepang. Pada puncak deflasi periode 1881-1886, para petani miskin mengalir menuju Tokyo, Osaka, dan kota-kota besar lainnya setelah kehilangan tanah dan penghidupannya. Menurut survey pemerintah tahun 1883, sejumlah besar penduduk yang bermigrasi ke kota mengidap penyakit dan

menyebarkan epidemi ke seluruh lingkungan yang padat penduduk dan tidak memiliki sanitasi yang sehat.

Yokoyama Gennosuke, seorang reporter investigasi bagi surat kabar *Mainichi Shinbun*, pada tahun 1889 mempublikasikan suatu studi yang memberikan dampak besar pada masa itu yang berjudul *Nihon no Kasō Shakai* (Masyarakat Strata Bawah Jepang). Ia menggambarkan bagaimana perjuangan hidup para buruh tani, orang miskin di perkotaan, buruh pabrik, dan terutama perempuan dan anak-anak yang bekerja di pabrik-pabrik tekstil dan korek api. Orang-orang miskin sebelumnya sering kali disebut sebagai *saimin* (orang miskin) atau *kasōmin* (orang yang rendah), namun Yokoyama mempopulerkan istilah *kasō shakai* (masyarakat strata bawah) untuk menunjukkan kondisi bahwa anggota masyarakat yang tidak beruntung dapat jatuh ke dalam kesusahan dan hal itu terjadi bukan karena perbuatan ataupun kesalahan yang dilakukannya (Garon, 1987: 24).

Inilah tahap pertama dari masalah buruh, yaitu yang bersifat humanitarian. Dengan makin meluasnya kesadaran di kalangan umum mengenai buruknya keadaan masyarakat kelas menengah kebawah Jepang, banyak bermunculan tokoh-tokoh dan organisasi-organisasi yang bersimpati dan melakukan kegiatan humanitarian dan *philanthropy* (kedermawanan) untuk menolong orang-orang yang berkekurangan tersebut. Merekalah yang kemudian turut mendukung agar pemerintah melakukan perbaikan taraf hidup kaum buruh.

Professor Kanai Noburu, seorang ekonom dari Universitas Imperial Tokyo, yang mempelajari perundang-undangan sosial di Jerman dan Inggris, pada tahun 1890 kembali ke Jepang dan mulai mempopulerkan konsep “*Shakai Mondai*” (Masalah Sosial). Ia juga memperkenalkan istilah “*Shakai Seisaku*” (Kebijakan Sosial) yang diambil dari ide bangsa Jerman tentang *Sozialpolitik*. Bersama dengan ahli politik ekonomi lainnya yang sepandangan seperti Professor Kuwata Kumazo, Kanai membentuk *Nihon Shakai Seisaku Gakkai* (Asosiasi Kebijakan Sosial Jepang) yang merupakan gerakan asosiasi akademisi untuk mendorong pembuatan hukum pabrik dan UU sosial lainnya.

Pandangan baru tentang kebijakan sosial ini merefleksikan perubahan besar pada teori ekonomi di Eropa dan Jepang di akhir abad ke 19. Pada periode 1890an, orang-orang Jepang yang mempelajari politik ekonomi Inggris berpendapat bahwa masalah perburuhan (*rōdō mondai*) pada dasarnya berkaitan dengan hukum ekonomi: jika dibiarkan, dengan sendirinya persaingan akan menciptakan harmoni antara buruh dan kapitalis. Hal ini ditentang Kanai dan koleganya yang berpegang pada teori yang berkembang di Jerman. Mereka menekankan bahwa sudah menjadi tugas etika negara untuk melindungi yang lemah dari kejayaan industrialisasi demi keteraturan sosial.

Kanai juga menekankan tentang kebijakan sosial Jepang bahwa menjadi kewajiban negara untuk melindungi dan mengangkat kelas buruh dari kapitalis. Kebijakan sosial tidak berdasarkan sekedar sikap “*philanthropy*” (kedermawanan), tapi berdasarkan kepentingan yang lebih tinggi bagi “negara sosial” (*social state*) yang jauh lebih penting daripada kelas sosial seseorang. Isu perburuhan merupakan tantangan yang besar bagi negara karena kesenjangan yang makin melebar antara kaya dan miskin akan rentan terhadap “kehancuran keteraturan sosial dan rusaknya kedamaian publik”. Berdasarkan pemikiran tersebut Kanai dan beberapa intelektual dan akademisi lainnya terus mendorong pemerintah untuk segera membuat kebijakan sosial yang dapat memperbaiki masalah sosial tersebut.

2.4 Kebijakan Pemerintah & Pengaruh Kalangan Pengusaha

Pengalaman negara-negara Barat memberikan pengaruh yang kuat terhadap pembentukan sikap Jepang terhadap masalah-masalah sosial yang menyertai industrialisasi. Konflik ideologi atas RUU perburuhan terutama diwarnai oleh pengetahuan akan kekacauan sosial yang dialami negara lain karena revolusi industri. Pemimpin bisnis dan pemerintahan Jepang sadar bahwa perubahan perekonomian rentan terhadap bahaya, dan mereka berharap bahwa Jepang dapat menghindari kesulitan-kesulitan yang dialami negara-negara Barat ketika menghadapi masalah-masalah perburuhan (Marshall, 1967: 51).

Asosiasi-asosiasi bisnis segera bermunculan setelah dibentuknya Kamar Dagang Tokyo tahun 1878. Para pemilik pabrik tekstil pada tahun 1882 membentuk Asosiasi Penenun Katun yang memiliki pengaruh yang kuat. Walaupun pemerintah memberikan subsidi bagi awal pembentukan Kamar-kamar Dagang, grup-grup pebisnis tidak ragu dalam melindungi kepentingan mereka. Terlebih lagi, pendapat mereka memberikan pengaruh yang besar dalam pemerintahan karena beberapa diantaranya merupakan mantan pejabat pemerintahan. Kamar Dagang Tokyo dipimpin oleh pengusaha berpengaruh Shibusawa Eichi dan Matsuda Takashi yang sebelumnya keluar dari Kementerian Keuangan pada awal 1970an. Inoue Kaoru adalah salah satu contoh pensiunan pejabat yang juga merangkap sebagai pengusaha. Inoue pernah beberapa kali menjabat sebagai menteri dan memimpin biro-biro pemerintah pada periode 1878-1898, sementara ia juga menjabat sebagai direktur di beberapa perusahaan besar Jepang. Pada tahun 1890an, kepentingan beberapa menteri di kabinet Jepang sudah sangat berkaitan dengan Furukawa Ichibei, seorang pemilik pertambangan, sehingga butuh waktu bertahun-tahun sebelum pemerintah akhirnya memerintahkannya untuk berhenti membuang limbah yang sangat beracun di Tambang Besi Ashio (Garon, 1987: 19).

Secara struktural pun, birokrat Jepang umumnya kurang memiliki kesatuan kohesif dan independensi dari kepentingan bisnis yang diperlukan untuk dapat meloloskan kebijakan-kebijakan perlindungan buruh yang ketat. Biro Industri di Kementerian Agrrikultur dan Perdagangan adalah bagian yang bertanggung jawab terhadap penanganan kebijakan dan perundang-undangan perburuhan mulai tahun 1881. Biro tersebut hanya berkonsentrasi untuk mempertahankan keadaan yang memungkinkan bagi berjalannya kegiatan industri swasta. Dalam mengeluarkan draft RUU Pabrik tahun 1882-1911, mereka hanya berkonsultasi dengan asosiasi-asosiasi bisnis namun tidak pernah memperdulikan pendapat kelompok-kelompok buruh.

Dalam usaha mereka untuk meningkatkan produktivitas industri, Biro Industri mengajukan RUU Pabrik yang mencerminkan kepentingan pengusaha. Pada saat itu, hal yang menjadi permasalahan bagi pemerintah dan pengusaha adalah tingginya mobilitas (perpindahan) buruh yang tinggi walaupun saat itu

industri Jepang sedang mengalami kekurangan tenaga kerja. Walaupun ada beberapa pengusaha yang mendukung intervensi pemerintah dalam mengatur masalah perburuhan, namun sebagian besar diantaranya menolak intervensi tersebut. Mereka berpendapat bahwa mobilitas buruh yang tinggi dan pelanggaran kontrak kerja dapat diatasi dengan hukuman-hukuman yang lebih ketat dan berat yang disepakati dalam kontrak kerja tanpa perlu adanya intervensi khusus pemerintah (Garon, 1987: 20 dan Marshall. 1967: 52).

Pada saat itu, Biro Industri mengajukan RUU yang lebih bertujuan untuk mengatur buruh daripada majikannya. Draft pertama RUU Pabrik hanya berisi beberapa perlindungan bagi buruh perempuan dan anak-anak, sementara itu memberikan penalti yang berat bagi pekerja yang melanggar kontrak atau memutuskan untuk berhenti bekerja ataupun melakukan konspirasi untuk melakukan hal tersebut. Untuk menekan mobilitas buruh, RUU tersebut juga mengatur agar setiap buruh memiliki surat ijin kerja. Pada dekade 1880an dan 1890an, pemerintah mengajukan draft-draft RUU yang memberikan aturan yang lebih ketat bagi perlindungan buruh seperti pembatasan waktu kerja bagi perempuan dan anak-anak, namun juga memberikan aturan-aturan yang lebih banyak menguntungkan kalangan pengusaha. Daripada mengenali mobilitas buruh sebagai karakteristik dari pasar, pemerintah makin membatasi kebebasan pergerakan buruh dengan alasan bahwa mobilitas yang tinggi akan menghambat industri dalam mengembangkan tenaga kerja ahli (Garon, 1987: 20-21).

Dalam ekspansi perekonomian setelah perang Cina-Jepang, pemerintah mulai menyadari pentingnya UU yang melindungi buruh pabrik dan mengatur kondisi kerja di saat industri-industri swasta mulai banyak bermunculan. Pemerintah mengajukan revisi RUU Pabrik pada tahun 1896 dan 1898 yang isinya mengatur batas minimum kesehatan buruh, standarisasi keamanan tempat kerja, dan pembatasan waktu kerja bagi perempuan dan anak-anak. Tujuan dari UU tersebut adalah untuk memastikan keuntungan bersama antara buruh dan majikannya dengan cara melindungi hak kedua pihak dan menciptakan hubungan yang harmonis antara kedua pihak. Soeda Juichi, salah seorang delegasi pemerintah yang mengajukan draft RUU ini menyatakan:

Dengan peningkatan penggunaan mesin yang makin intensif dan mulainya kita memasuki persaingan yang terbuka antar individu, akan ada usaha untuk meraih keuntungan; dengan demikian kita tidak akan dapat lebih lanjut lagi yakin bahwa semangat kebaikan akan dapat bertahan diantara manusia (Marshall, 1967: 54).

Pemerintah beranggapan, berdasarkan observasi terhadap hubungan industri Barat, bahwa industrialisasi tak terelakkan akan mempengaruhi sikap buruh dan kaum pengusaha, dan menciptakan hubungan yang berdasarkan pada kewajiban kontrak yang rentan terhadap konflik. Mereka juga beralasan bahwa kondisi kesehatan tenaga kerja juga penting bagi perkembangan perekonomian serta tugas moral pemerintah untuk melindungi pihak yang lemah dari eksploitasi.

Tentangan dari kalangan pengusaha memaksa pemerintah untuk merevisi lebih lanjut RUU tersebut. Mereka mengeluarkan alasan sebagai berikut:

(1) RUU tersebut masih prematur karena Jepang belum mengalami masalah-masalah industri gaya Barat. (2) Pengusaha-pengusaha Jepang memperlakukan pekerjanya secara lebih baik daripada di negara-negara Barat. (3) pembatasan waktu kerja bagi perempuan dan anak-anak akan menaikkan biaya produksi dan menghancurkan posisi Jepang yang kompetitif di pasar dunia (Garon, 1987: 21).

Mereka menganggap RUU ini akan menghapus cita-cita Jepang untuk menjadi negara maju yang sebanding dengan negara-negara maju di Barat. Mereka menekankan perlunya bagi para buruh untuk mau berkorban bagi kepentingan nasional.

Dengan makin banyaknya keresahan di kalangan buruh dan konflik buruh yang terjadi, pemerintah makin mendesak pentingnya intervensi dari pihak pemerintah melalui pembuatan RUU Pabrik. Menanggapi desakan tersebut, kalangan pengusaha memberikan alasan bahwa hubungan industri di Jepang berbeda dengan yang ada di Barat. Mereka menekankan bahwa hubungan kalangan pengusaha dengan buruh adalah unik disertai dengan tradisi Jepang yang menekankan paternalisme dan loyalitas. Mereka berargumentasi bahwa “warisan

budaya tradisi Jepang akan membuatnya terhindar dari penyakit sosial yang menyebar secara luas di negara-negara Barat” (Marshall, 1967: 57). Bahkan adaptasi UU perburuhan dari Barat hanya akan mendorong terjadinya kekacauan daripada mencegah.

Hanya dengan menolak relevansi dari solusi Barat maka kalangan pengusaha Jepang dapat menyerang asumsi bahwa Jepang harus belajar dari kesalahan Barat atau mengulangi kesalahan tersebut. Dengan makin tidak populernya westernisasi pada akhir dekade 1880an dan meluasnya pandangan untuk mempertahankan warisan tradisi dan budaya Jepang, kalangan pengusaha mampu meraih banyak dukungan di kalangan konservatif untuk menolak RUU ajuan pemerintah. Munculnya gerakan sosialis yang militan pada tahun 1900an makin memperkuat argumen ini untuk mempertahankan tradisi dalam masalah perburuhan dari revolusi yang hendak dilancarkan kaum sosialis.

Biro Kesehatan dan Sanitasi dibawah pimpinan Goto Shimpei mengajukan proposal yang pertama bagi pembuatan hukum asuransi sakit bagi buruh pada tahun 1898 namun ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri. Biro tersebut akhirnya terfokus untuk mendukung pemberlakuan hukum pabrik, yang isinya termasuk perlindungan kesehatan buruh, yang sedang dilakukan Biro Industri. Pada tahun 1900, pemerintah mendirikan Badan Survey Pabrik (*Kōjō Chōsakari*) yang bersifat sementara. Badan ini lalu mengeluarkan hasil survey pemerintah tentang perburuhan (*Shokkō Jijō*) pada tahun 1903 (Garon, 1987:27).

Shokkō Jijō menggambarkan akibat-akibat buruk dari industrialisasi yang tak terkendali. Keadaan di pabrik-pabrik tekstil dan industri ringan lainnya menunjukkan eksploitasi terhadap buruh perempuan, yang mengejutkan banyak pejabat dan pendukung reformasi sosial. Laporan tersebut juga menyebutkan masalah-masalah sosial yang dialami buruh anak-anak. Pemerintah sudah berkomitmen sebelumnya untuk memberikan pendidikan bagi anak agar dapat keluar dari kemiskinan di masa depan dan mengadakan wajib belajar. Namun kenyataannya, dilaporkan meluasnya penggunaan anak-anak dari daerah kumuh sebagai buruh, bahkan anak-anak yang berumur 6-7 tahun.

Usaha pertama pemerintah Jepang untuk melindungi buruh adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pertambangan pada 1905. Di dalamnya antara lain mengatur dengan jelas mengenai kompensasi yang harus diberikan perusahaan jika salah satu pekerjanya mengalami cedera atau sakit karena pekerjaan.

Hal yang makin membuat masalah perburuhan sebagai masalah sosial yang mendesak adalah ancamannya terhadap kesehatan bangsa secara keseluruhan. Pada tahun 1909, kabinet Katsura (1908-1911) mengajukan RUU Pabrik mengenai buruh pabrik ke Parlemen, namun terpaksa mundur karena menghadapi tentangan yang kuat dari kalangan pengusaha dan *Seiyūkai* yang menjadi sekutunya di Majelis Rendah. Mereka mengkritik isi dari RUU yang diantaranya akan menghapus jam kerja malam bagi buruh perempuan dan anak-anak dalam 10 tahun. Menghadapi kritikan tersebut, Biro Kesehatan dan Sanitasi lalu maju, mengeluarkan laporan dari akibat-akibat buruk bagi kesehatan yang dialami perempuan dan anak-anak yang dipaksa bekerja siang dan malam tanpa istirahat dan gizi yang cukup. Sejumlah besar diantaranya dilaporkan mengidap tuberculosi dan penyakit menular lainnya, sehingga ribuan buruh yang sakit dipulangkan oleh manajemen industri ke desa-desa asalnya dan disana mereka kembali menularkannya ke orang lain (Garon, 1987: 28).

Keadaan buruh di industri tidak bisa lagi dianggap hanya sebagai elemen dalam produksi. Dengan demikian pemerintah dapat melawan oposisi di Parlemen dan mampu meresmikan UU Pabrik pada 28 Maret 1911 setelah berkali-kali direvisi selama 30 tahun sejak 1881.

UU Pabrik merupakan langkah yang vital bagi usaha pemerintah Jepang dalam usaha melindungi buruh. UU tersebut mengatur kesehatan minimum buruh dan standar keamanan bagi industri yang mempekerjakan 15 buruh atau lebih. Manajemen industri juga bertanggung jawab atas kecelakaan di saat bekerja. Penetapan usia minimum yang diperbolehkan bekerja yaitu 12 tahun. Juga ditetapkan batas waktu kerja 12 jam sehari bagi buruh perempuan dan anak-anak, serta melarang jam kerja malam bagi mereka. Selain itu, buruh perempuan dan buruh yang berusia di bawah 16 tahun harus diberikan minimal dua hari istirahat

setiap bulannya (Ayusawa, 1976:106-111; Garon, 1987: 28-29 dan Sugeno, 1992: 6).

Sayangnya, lolosnya UU Pabrik bukanlah simbol dari kalahnya kalangan pengusaha dan kepentingannya. UU tersebut baru berhasil diresmikan oleh Parlemen setelah dalam revisi tahun 1911 isinya “diperlunak” sesuai dengan keinginan Kalangan pengusaha. Oleh karena manuver politik para pengusaha, industri diberikan kelonggaran waktu sebelum Undang-Undang tersebut benar-benar diterapkan. Mereka mampu memaksa pemerintah untuk memberikan waktu 15 tahun penundaan sebelum pelaksanaan larangan jam kerja malam bagi buruh perempuan dan anak-anak. Lebih lanjut lagi, mereka juga mampu melobi pemerintah agar pelaksanaan seluruh isi dari UU Pabrik ditunda hingga 1916. Sedangkan perlindungan buruh pria sama sekali tak tersentuh. Inspeksi-inspeksi pemerintah untuk memeriksa apakah Undang-Undang ini dijalankan oleh semua perusahaan pun sangat kurang (Ayusawa, 1979: 106; Garon, 1987: 29 dan Wray, 1989: 56-57).

Kalangan pengusaha mampu menggunakan nasionalisme bangsa sebagai senjata untuk meraih dukungan terhadap isu-isu yang akan mengganggu kepentingan bisnis mereka. Tidaklah menjadi soal apakah argumen-argumen yang diberikan antara pihak pemerintah dan pengusaha valid atau tidak atau apakah industri Jepang akan mampu meraih kesuksesan yang sama apabila UU Pabrik sudah diresmikan sejak tahun 1890an. Inti dari uraian di atas untuk melihat bagaimana kalangan industri mampu dalam memainkan emosi atau perasaan nasionalisme demi kepentingan mereka sendiri.

Pada periode Meiji hingga awal Shōwa hukum perburuhan terus menjadi isu pertentangan tanpa akhir antara pihak pemerintah, kalangan pengusaha/kapitalis, dan buruh. Kealpaan hukum perburuhan yang berakibat pada eksploitasi buruh inilah yang mendorong munculnya ketidakpuasan di kalangan buruh dan melahirkan gerakan buruh Jepang yang menuntut perbaikan bagi status sosial dan keadaan hidup mereka.

BAB III

GERAKAN BURUH JEPANG

3.1 Awal Munculnya Gerakan Buruh di Jepang

Pada tahap kedua dari empat tahap evolusi permasalahan buruh yang dikemukakan oleh Ayusawa (Bab II: 16-17), dikemukakan bahwa permasalahan buruh yang sebelumnya bersifat humanitarian telah berkembang menjadi masalah yang bersifat sosio-ekonomi. Permasalahan buruh tidak lagi terkonsentrasi pada individu-individu buruh yang lemah dan miskin, namun berpusat pada kolektivitas para buruh yang mulai memiliki kesadaran akan kelas sosialnya. Walaupun para buruh umumnya masih tidak terdidik, tidak berpengalaman, dan miskin, akan tetapi mereka sudah mulai bersatu dan membentuk kelompok. Kelompok yang makin kuat inilah yang kemudian berkembang menjadi serikat buruh dan bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak dasar mereka (Ayusawa, 1976:55).

Sebelum muncul gerakan buruh di Jepang, mogok kerja (*dōmei higyō*) sudah dikenal dan dilaksanakan oleh buruh untuk memprotes perlakuan buruk yang mereka terima. Namun yang lebih penting dalam sejarah gerakan buruh Jepang adalah usaha-usaha sekelompok intelektual yang hendak mengangkat taraf hidup buruh demi kemanusiaan dan keadilan sosial. Kaum intelektual terus memainkan peranan penting dalam gerakan buruh Jepang.

Gerakan buruh Jepang lahir pada dekade akhir abad ke sembilan belas. Aksi pertama untuk mengorganisasi buruh Jepang dilakukan sekelompok intelektual yang sedang belajar di Amerika Serikat dan dipelopori oleh Takano Fusataro, Sawada Hannosuke, dan Jo Tsunetaro. Pada tahun 1890, mereka mengadakan pertemuan di San Fransisco, Amerika Serikat dan membentuk *Shokkō Giyū Kai* (Perkumpulan Ksatria Buruh) yang bertujuan untuk mempelajari perkembangan perburuhan di Eropa dan Amerika Serikat demi memberikan solusi

bagi permasalahan perburuhan yang ada di Jepang. Selama disana, Takano Fusataro menjalin hubungan dengan Samuel Gompers yang merupakan pemimpin American Federation of Labor (AFL). Pada tahun 1894, Takano mulai rutin menulis artikel tentang permasalahan buruh di Jepang untuk jurnal *The American Federationist* milik AFL (Scalapino, 1983: 2).

Sekembalinya mereka di Jepang pada tahun 1896, mereka bersama dengan beberapa tokoh lainnya seperti Katayama Sen mulai menyebarkan ide perserikatan buruh dan pada musim panas 1897 mendirikan *Rōdō Kumiai Kisei Kai* (Perkumpulan untuk Mempromosikan Serikat Buruh) yang didukung oleh pengusaha berpandangan terbuka, kaum intelektual yang progresif dan politisi-politisi yang liberal. Selain bertujuan untuk mempromosikan pengorganisasian buruh secara modern melalui serikat buruh, mereka juga mengajukan Proposal Undang-Undang untuk melindungi buruh kepada pemerintah dan menyebarkan anjuran agar semua serikat buruh dapat bekerja sama demi kepentingan bersama. Mereka juga menerbitkan secara rutin jurnal *Rōdō Sekai* (Dunia Perburuhan) yang bertujuan untuk mendidik buruh.

Dengan bantuan perkumpulan ini, mulai tahun 1898 lahir serikat-serikat buruh di Jepang seperti Serikat Buruh Pabrik Besi (*Tekkō Kumiai*), Serikat Buruh Percetakan (*Kappanko Kumiai*), dan Serikat Teknisi Kereta Api (*Nittetsu Kyoseikai*). Serikat-serikat buruh tersebut merupakan sarana bagi para buruh menyampaikan keinginan mereka untuk maju, dihargai dan memperoleh perlakuan yang sama seperti tenaga kerja berpendidikan (*white collar worker*). (Ayusawa 1976: 65 dan Gordon, 1988: 29).

Walau demikian, *Rōdō Kumiai Kisei Kai* berusaha untuk menghindari konfrontasi langsung dengan pihak pengusaha. Mereka tidak menganjurkan mogok kerja sebagai senjata untuk menuntut perbaikan hidup para buruh. Dalam jurnal yang diterbitkannya, mereka selalu menyatakan bahwa serikat buruh bertujuan sebagai sarana mediasi dalam konflik buruh dan terfokus untuk memperhatikan kepentingan utama para buruh. Katayama Sen, editor kepala dari jurnal *Rōdō Sekai*, menyatakan bahwa kebijakan jurnal tersebut adalah “bukan untuk menciptakan konflik dengan kaum kapitalis, namun lebih untuk

menyempurnakan keharmonisan dan kerjasama (*chōwa*) yang sejati” (Garon, 1987: 17). Gerakan buruh Jepang pada masa itu belum menggunakan istilah “memperjuangkan hak-hak dasar” dalam tuntutan mereka. Mereka lebih mengutamakan untuk terlebih dahulu mengangkat status sosial mereka yang direndahkan dalam masyarakat dan lingkungan kerja di Jepang.

Tabel 3.1: Perkembangan *Tekkō Kumiai*, 1897-1898

Tanggal	Cabang	Keanggotaan
1 Desember 1897	13	1,183
1 Februari 1898	13	2,000
15 Maret 1898	18	2,400
1 Mei 1898	19	2,500
1 Agustus 1898	24	2,700
1 September 1898	27	2,700
15 Oktober 1898	30	2,700
1 Desember 1898	32	3,000

Sumber: Marsland, “*The Birth of the Japanese Labor Movement: Takano Fusataro and the Rōdō Kumiai Kiseikai*”, h. 79 (1989).

Walau *Rōdō Kumiai Kisei Kai* menentang konflik dan tidak menganjurkan mogok kerja, akan tetapi eksploitasi buruh oleh kaum pengusaha dan rendahnya kesejahteraan buruh membuat para buruh terus menggunakan mogok kerja sebagai senjata dalam konflik buruh. Seperti yang terlihat pada Tabel 3.2, sebagian besar mogok kerja dilancarkan adalah karena masalah upah. Namun sebagian besar mogok kerja pada masa itu berakhir dengan kekalahan di pihak buruh dan dipecatnya para buruh yang memimpin mogok kerja.

Tabel 3.2: Mogok Kerja, 1897-1898

Alasan	Paruh Akhir 1897		1898	
	Kasus	Partisipan	Kasus	Partisipan
Kenaikan Upah	21	2,248	35	5,699
Upah (Lainnya)	6	779	3	381
Jam kerja agar lebih pendek	-	-	1	68
Menentang Mandor	1	155	-	-
Menentang Pemecatan	2	188	-	-
Lainnya	2	145	4	145
Total	32	3,510	43	6,293

Sumber: Sumiya Mikio, *et al*, "Nihon ShinhonShugi to Rōdō Mondai" h. 116 (Marsland, 1989: 92)

Ketika pemerintah mempublikasikan draft Undang-Undang Pabrik, *Rōdō Kumiai Kisei Kai* memberikan komentar tajam dan mengajukan memorandum kepada pemerintah yang merekomendasikan perbaikan di dalam isi draft UU Pabrik yang dianggap kurang. Ketika pemerintah hendak meresmikan Undang-Undang Ketertiban Publik (*Chian Keisatsu Hō*) tahun 1900 untuk merepresi kegiatan serikat buruh, *Kisei Kai* juga memperingatkan pemerintah bahwa "tindakan represif hanya akan memperburuk permasalahan buruh yang ada" (Ayusawa, 1976: 62). Tindakan-tindakan *Kisei Kai* tersebut memang sangat berguna dan efektif bagi gerakan buruh di Jepang, namun di antara semuanya, hal yang paling memberikan kontribusi adalah bantuan yang diberikannya dalam pembentukan serikat-serikat buruh yang baru.

Ketika *Rōdō Kumiai Kisei Kai* sedang aktif mempromosikan pembentukan serikat-serikat buruh di daerah Tokyo, di daerah Timur Jepang, sebuah organisasi lain juga dibentuk pada tahun 1899 di daerah Barat Jepang yaitu Osaka. Organisasi tersebut bernama *Dai Nippon Rōdō Kyōkai* (Institusi Buruh Jepang) dan dipimpin oleh Oi Kentaro dan Yanai Yoshinoshin. Sebelumnya Oi Kentaro pernah mendirikan *Nippon Rōdō Kyōkai* tahun 1892 dibawah partai pimpinannya *Tōyō Jiyū Tō* (Partai Oriental Liberal) sebagai salah satu instrumen untuk

mengumpulkan pendukung dalam protes politik yang ia lancarkan pada masa itu terhadap pemerintah dan tak bertahan lama (Ayusawa, 1976: 37-38 dan 64).

Berbeda dengan sebelumnya, Organisasi baru pimpinan Oi Kentaro tersebut memiliki program yang nyata untuk memperbaiki keadaan para buruh. Program tersebut termasuk:

- (1) Pusat pelatihan kejuruan untuk memberikan kesempatan bagi para buruh miskin dalam memperoleh pekerjaan yang lebih baik.
- (2) Pelatihan kejuruan bagi mantan napi.
- (3) Sekolah malam untuk buruh anak-anak.
- (4) Asrama khusus bagi para buruh tertentu, seperti buruh perempuan pabrik tekstil.
- (5) Tempat pemandian gratis.
- (6) Klinik pengobatan gratis.
- (7) Bank khusus untuk buruh.
- (8) Asuransi jiwa, kesehatan dan kecelakaan.
- (9) Asuransi kebakaran.
- (10) Fasilitas tempat tinggal yang gratis atau murah untuk buruh pabrik dan tambang.
- (11) Hukum yang memberikan jaminan bila terjadi kecelakaan bagi buruh.
- (12) Hukum untuk mengontrol perekrutan nelayan di Hokkaido. (Ayusawa, 1976: 64-65)

Program tersebut menunjukkan salah satu contoh dalam kemajuan pola pikir para tokoh gerakan buruh pada masa itu. Dari yang sebelumnya mereka hanya melakukan protes-protes terhadap ketidak-adilan sosial, mereka sekarang sudah mulai merancang dan melaksanakan rencana-rencana yang nyata dapat memberikan pengaruh demi perbaikan keadaan buruh. Selain itu, gerakan buruh pada masa itu juga mulai menunjukkan bahwa pengorganisasian buruh tidak hanya terpaku pada satu industri atau suatu kelas tertentu. Mereka sudah menyadari pentingnya persatuan dari gerakan buruh untuk memperjuangkan nasib para buruh secara universal.

3.2 Represi Pemerintah dan Akibatnya

Dari awal perkembangan kerangka hukum pada awal periode Meiji, buruh sudah tidak puas dengan orientasi terhadap status sosial yang terjadi saat itu dan menuntut persamaan hak. Majikan dan tuan tanah menentang permintaan tersebut dengan alasan bahwa mereka memiliki kebebasan secara hukum dalam

menentukan kontrak kerja, terutama kebebasan untuk memecat buruh. Para buruh lalu mulai berorganisasi dan mengadakan perlawanan terhadap perlakuan yang tidak adil tersebut sehingga timbullah konflik buruh.

Menghadapi mogok kerja dan aktivitas buruh dalam serikat buruh, maka para pengusaha mulai menerapkan kebijakan untuk membuat daftar hitam semua buruh yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Perusahaan dapat dengan mudah memecat para buruh yang dianggap memimpin pemogokan maupun yang hendak mengorganisir suatu serikat buruh karena belum adanya hukum yang melindungi buruh dari perlakuan perusahaan seperti itu.

Untuk menghadapi mogok kerja dan demonstrasi para buruh, pemerintah mengeluarkan peraturan *Gyōsei Keisatsu Hō* (Peraturan Administrasi Kepolisian) pada 7 Maret 1874 yang memberikan otoritas bagi polisi dalam mengambil tindakan yang diperlukan untuk “menghindari terjadinya bencana dalam masyarakat” dan mempertahankan ketertiban umum. Peraturan lain dikeluarkan pada 24 September 1884 yaitu *Ikei-Zai Shokketsu Rei* yang memberikan kekuasaan bagi polisi untuk menindak pelaku tindak pidana ringan tanpa melalui pengadilan. Akan tetapi pemerintah masih menganggap bahwa peraturan-peraturan tersebut masih belum cukup untuk mengatasi permasalahan politik, sosial dan perburuhan yang timbul.

Pada 10 Maret 1900, Parlemen Jepang meresmikan Undang-Undang Ketertiban Publik (*Chian Keisatsu Hō*). Walaupun hal yang terutama dalam UU ini adalah untuk mengekang kegiatan politik yang menentang pemerintah, Undang-Undang ini menjadi “hukuman mati” bagi gerakan buruh Jepang saat itu. Menteri Dalam Negeri Arimatsu dalam pertemuannya dengan Parlemen pada Februari 1900 berkata:

“Ada kemungkinan besar bahwa perkumpulan-perkumpulan buruh akan menjadi tak terkendali di masa akan datang. Apabila perintah pembubaran tidak bisa dilakukan sebelum mereka mengadakan pertemuan, bagaimana kedamaian dan ketertiban dapat dipertahankan?” (Ayusawa, 1976: 70).

Dengan Undang-Undang ini, siapapun yang bertujuan untuk menarik orang-orang bergabung suatu kelompok, melakukan tindak kekerasan, ancaman, atau fitnah, atau mengajak orang-orang melakukan mogok kerja, akan dikenai hukum pidana. Undang-Undang ini dapat diinterpretasikan secara luas karena maknanya yang kurang jelas, sehingga gerakan buruh yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi buruh selalu terancam dengan penahanan ataupun pembubaran oleh polisi. Isi UU ini secara garis besar antara lain:

Pertemuan-pertemuan publik yang tidak bertujuan untuk mempertahankan kedamaian dan ketertiban harus terlebih dahulu dilaporkan ke polisi (Pasal 3). Pertemuan dan aksi massa di tempat umum harus dilaporkan paling lambat dua belas jam sebelumnya, pelanggaran akan dikenai denda (Pasal 4). Polisi berhak, demi menjaga kedamaian dan ketertiban, untuk membatasi, melarang, atau membubarkan pertemuan di tempat umum atau aksi massa atau kerumunan orang (Pasal 8). Polisi, untuk alasan yang sama, dapat membubarkan pertemuan di dalam ruangan. Siapapun yang menolak untuk mematuhi perintah tersebut dapat dikenai denda atau dihukum penjara (Pasal 23). Bila diperlukan demi kedamaian dan ketertiban, Departemen Dalam Negeri dapat melarang sebuah perkumpulan (Pasal 8-11). Seorang polisi berseragam dapat mengunjungi atau meminta tempat di dalam sebuah pertemuan dan memberikan pertanyaan (pasal 11, 25). Semua perkumpulan rahasia dilarang, pelanggar akan dihukum penjara enam hingga dua belas bulan (Pasal 14, 28). Petugas polisi berdasarkan keputusannya dapat melarang memperlihatkan, membagikan, membacakan atau menyanyikan atau ekspresi lainnya terhadap literatur, sebuah dokumen atau lagu yang dianggap dapat mengancam kedamaian dan ketertiban (Pasal 18). (Ayusawa, 1976:71)

Namun pasal-pasal dalam *Chian Keisatsu Hō* yang paling menjatuhkan gerakan buruh di Jepang adalah Pasal 17 dan 30:

Pasal 17: Tidak seorang pun diperbolehkan melakukan aksi kekerasan atau secara publik menghina orang lain dengan tujuan yang disebutkan di bawah, atau membujuk maupun memprovokasi orang lain dengan tujuan yang disebutkan di bawah:

(1) Agar orang lain bergabung atau untuk mencegah orang lain bergabung dengan sebuah organisasi yang bertujuan sebagai aksi kolektif berhubungan dengan kondisi kerja atau upah.

(2) Agar majikan memecat buruh, atau agar ia menolak suatu lamaran kerja, atau agar buruh menghentikan pekerjaannya, atau agar sang buruh menolak tawaran kerja dengan tujuan untuk mengorganisir sebuah penutupan tempat kerja atau mogok kerja.

(3) Agar pihak lain terpaksa menyetujui persyaratan dari upah.

Tidak seorangpun diperbolehkan melakukan tindak kekerasan atau mengancam pihak lain atau memfitnahnya secara publik demi memaksa pihak tersebut menyetujui persyaratan penyewaan tanah untuk bertani.

Pasal 30: Siapapun yang melanggar Pasal 17 akan terancam hukuman 1 hingga 6 bulan penjara dan denda tambahan 3 hingga 30 yen. Hal yang sama akan berlaku bagi siapapun yang melakukan tindak kekerasan, mengancam, atau secara publik memfitnah seseorang yang tidak bergabung dengan majikan dalam sebuah penutupan tempat kerja maupun dengan para buruh dalam sebuah mogok kerja. (Ayusawa, 1976:71-72)

Dengan diterapkannya UU ini maka dimulailah pengawasan yang intensif dan represif terhadap semua jenis kegiatan massa, bahkan termasuk kelompok-kelompok piknik yang tak berbahaya. Tiga bulan setelah pelaksanaan Undang-Undang Ketertiban Publik (6 Juni 1900), pemerintah mengeluarkan *Gyōsei Shikkō Hō* (Undang-Undang Kegiatan Administratif) yang salah satu isinya memberikan kuasa bagi polisi untuk langsung menahan seseorang yang dianggap hendak melakukan kekerasan atau perkelahian atau tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Hukum ini digunakan untuk membatasi penyebaran gerakan sosial seperti gerakan buruh.

Memang jika kita memperhatikan karakter gerakan buruh Jepang yang bersifat idealis dan moderat, tindakan represif yang dilakukan pemerintah Jepang terlihat berlebihan. Namun tindakan drastis yang diambil pemerintah Jepang bertujuan untuk mencegah munculnya gerakan kaum proletariat yang dapat mengganggu stabilitas negara seperti yang dialami negara-negara maju Barat sebelumnya dan *Revolusi Bolshevik* yang menjatuhkan monarki Rusia. Hukum yang diterapkan dalam masalah perburuhan pada masa itu adalah hukum kriminal (pidana), yang menurut istilah Kahn-Freund merupakan hukum yang bersifat represif.

Tabel 3.3:
Penangkapan terkait mogok kerja di bawah Pasal 17 UU *Chian Keisatsu Hō* dan tuduhan lainnya, 1914-1926

Tahun	Partisipan Mogok Kerja	Total Penangkapan	Pasal 17, "Penghasutan, Provokasi"	Pasal 17, Klausal lainnya	Subversi dan Tuduhan lainnya
1914	7,904	32	18	-	14
1915	7,852	65	9	55	1
1916	8,413	59	30	10	19
1917	57,309	174	104	34	36
1918	66,457	1,965	159	197	1,609
1919	63,137	536	58	61	417
1920	36,371	378	131	54	193
1921	58,225	634	16	68	550
1922	41,503	213	6	37	170
1923	36,259	237	11	10	216
1924	54,526	383	26	54	303
1925	40,742	331	-	17	314
1926	67,234	993	-	-	993

Sumber: *Kamii, "Chian Keisatsuho,"* h. 172 (Garon, 1987: 252)

Akibat yang langsung terlihat dari tindakan represi pemerintah adalah berkurangnya secara drastis organisasi serikat-serikat buruh. Namun tetap ada kesadaran di kalangan buruh untuk memperbaiki keadaan mereka. Represi pemerintah mengubah gerakan buruh menjadi gerakan bawah tanah dan berubah menjadi radikalisme sehingga konflik dan kerusuhan makin bertambah karena masalah perburuhan makin rentan terjadi di masa itu.

Konflik buruh pada saat itu dapat dengan mudah berubah menjadi kerusuhan dengan perusakan dan pembakaran barang-barang perusahaan. Walau konflik buruh makin berkurang, namun kerusakan akibat konflik buruh malah meningkat. Sebagai contohnya adalah pada Februari 1909 di Tambang Besi Ashio. 1.200 buruh tambang menuntut kenaikan upah dan perlakuan yang lebih baik. Ketika tuntutan tidak dipenuhi, mereka memotong jalur listrik, menghancurkan lampu-lampu, melempar bom, membakar perumahan perusahaan, serta mereka menduduki toko perusahaan. Akhirnya dikirim tiga pasukan infantri

dari Markas Regimen Takasaki untuk meredakan kerusuhan tersebut. Contoh Lainnya adalah mogok kerja para pegawai trem di Tokyo pada akhir tahun 1911. Konflik ini diredakan setelah ada intervensi polisi dan penangkapan 47 pegawai trem yang mogok (Ayusawa, 1976: 94).

Kelompok buruh berhaluan kiri yang dipimpin Kotoku Shusui bahkan menjadi sangat radikal sehingga Kotoku Shusui dan beberapa orang lainnya dituduh merencanakan untuk membunuh *Tennō* dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1910. Kotoku Shusui dan sebelas orang lainnya dieksekusi pada tahun berikutnya. Departemen Dalam Negeri lalu mendirikan *Tokkō Keisatsu* (Polisi Khusus) dengan tugas untuk menginvestigasi dan mengontrol gerakan buruh. Banyak tokoh-tokoh buruh lainnya yang menjadi frustrasi dan mengasingkan diri di luar negeri seperti Takano Fusataro yang pergi ke Cina dan Takayama Sen yang mengasingkan diri ke Uni Soviet.

Tabel 3.4: Konflik Buruh Pada akhir Zaman Meiji

Tahun	Kasus	Jumlah Partisipan	Rata-rata Partisipan di Setiap Kasus	Keterangan
1897	32	3.517	103	<i>Rōdō Kumiai Kisei Kai</i> dibentuk.
1898	43	6.293	146	
1899	15	4.284	285	
1900	11	2.316	211	UU Ketertiban Publik ditetapkan.
1901	18	1.948	101	
1902	8	1.849	231	
1903	9	1.359	152	
1904	6	879	146	Perang Jepang-Rusia dimulai.
1905	19	5.013	263	Perang Jepang-Rusia berakhir.
1906	13	2.037	156	
1907	57	9.855	173	
1908	13	822	63	
1909	11	310	28	
1910	10	2.934	293	
1911	22	2.100	95	

Sumber: *Kyocho Kai, Saikin no Shakai Undō*, halaman 322 (Ayusawa, 1979: 93)

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa dari 1897-1899 jumlah kasus konflik buruh yang menuntut keadaan yang lebih baik cenderung meningkat. Namun semenjak UU Ketertiban Publik ditetapkan pada tahun 1900, jumlah kasus pada tahun 1900-1904 cenderung menurun. Pada periode tahun 1905-1907, konflik buruh meningkat drastis dibanding periode sebelumnya dikarenakan gangguan keadaan perekonomian Jepang yang dialami setelah sebelumnya terjadi Perang Rusia-Jepang (1904-1905). Keadaan perekonomian kembali normal pada tahun 1908-1911 sehingga konflik buruh yang terus direpresi pemerintah pun kembali cenderung menurun. Selama kurun waktu 12 tahun periode tahun 1900-1911, kecuali masa resesi perekonomian tahun 1905-1907, partisipan kasus konflik buruh tidak pernah mencapai tiga ribu orang setiap tahunnya. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum yang dikeluarkan pemerintah telah mencapai tujuannya untuk merepresi konflik buruh dan gerakan buruh Jepang pada umumnya.

Pada akhir tahun 1900, semua serikat buruh yang ada di Jepang akhirnya bubar atau menjadi gerakan bawah tanah. Kalangan buruh Jepang menyebut masa 10-12 tahun setelah pelaksanaan *Chian Keisatsu Hō* sebagai *Chinsen Ki* (Periode Tenggelam) karena tenggelam/hilangnya gerakan buruh di Jepang pada masa itu. Walau konflik buruh berkurang drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi konflik buruh yang terjadi saat itu umumnya cenderung menjadi lebih menjurus pada kekerasan dan berubah menjadi kerusuhan dan penghancuran terhadap properti industri seperti di Tambang Besi Ashio, Tambang Batubara Horonai, dan Tambang Besi Besshi (Ayusawa, 1976: 155).

Dibalik segala konflik buruh pada periode tersebut, patut diperhatikan bahwa pendidikan formal sudah makin tersebar di kalangan buruh. 70% buruh pada tahun 1910 paling tidak telah menjalani pendidikan dasar empat tahun. Seorang jurnalis pada masa itu berkomentar: “Sekarang, mungkin lebih dari setengah jumlah buruh telah menjalani pendidikan sekolah dasar. Dengan semakin meningkatnya jumlah buruh yang terdidik, mereka menjadi makin sadar akan besarnya nilai mereka.” (Okochi, 1973:42-43)

Gerakan buruh di Jepang yang terhenti bukan berarti menghilang begitu saja. Beberapa tokoh gerakan buruh masih belum menyerah dan berusaha untuk

membangkitkan lagi gerakan buruh di Jepang. Barulah pada tahun 1912 serikat-serikat buruh di Jepang mulai bermunculan lagi untuk memulai kelahiran kembali gerakan buruh di Jepang.

3.3 Kelahiran Kembali Gerakan Buruh Jepang

Ketika era Meiji berakhir dengan meninggalnya Kaisar Meiji dan dimulainya era Taishō pada tahun 1912, sebagian besar masyarakat Jepang yang mengharapkan terjadinya *Taishō Ishin* (Pembaharuan Taishō) setelah *Meiji Ishin* (Pembaharuan Meiji) yang telah membawa perubahan besar bagi negara Jepang. Semangat inilah yang juga terefleksikan dalam gerakan buruh. Pada tanggal 1 Agustus 1912, Suzuki Bunji mendirikan *Yūai Kai* (Perkumpulan Cinta Persahabatan) dan memulai babak baru bagi gerakan buruh di Jepang.

Nihon Shakai Seisaku Gakkai dibawah pimpinan Kanai Noburu, Kuwata Kumazo, dan tokoh akademisi lainnya, yang mendukung komitmen pemerintah dalam mempertahankan kebijakan kapitalisme dan mencegah munculnya konflik kelas sosial dan sosialisme, semenjak berdirinya terus mendesak pemerintah agar turut menyertakan pihak buruh selain kaum kapitalis dalam penyusunan legislasi yang terkait dengan perburuhan (Bab II: 18). Mereka mendukung serikat buruh terhadap represi yang dilakukan pemerintah Jepang, membela hak buruh untuk melakukan mogok kerja, dan mendesak pemerintah agar mencabut Pasal 17 dari *Chian Keisatsu Hō* tahun 1900. Mereka percaya bahwa Buruh harus dapat memajukan keadaan hidupnya. *Nihon Shakai Seisaku Gakkai* juga turut berperan dalam perkembangan *Yūai Kai*. Tokoh-tokoh dari *Nihon Shakai Seisaku Gakkai* seperti Kuwata Kumazo, Takano Iwasaburo, dan Ogawa Shigejiro termasuk dalam dewan penasehat *Yūai Kai* (Garon 1987: 33)

Suzuki Bunji memulai *Yūai Kai* hanya dengan 14 anggota awal, yang terdiri dari para buruh pembuat *tatami* dan penyiram tanaman di Tokyo. Selain berhasil meraih simpati dan dukungan dari *Nihon Shakai Seisaku Gakkai*, Suzuki Bunji juga berhasil mendapatkan dukungan dari akademisi, kalangan bisnis dan pemimpin sipil lainnya seperti Horie Kiichi, Takeda Yoshisaburo, Uchigasaki Sakusaburo, Soeda Juichi (Preseden Bank Kogyo), dan Minami Ryo sebagai

penasehat. Bahkan pada tahun 1915 Shibusawa Eiichi menggunakan pengaruhnya untuk membujuk pemerintah agar Suzuki diperbolehkan mendapat paspor untuk menghadiri konvensi tahunan American Federation of Labor. Pada kesempatan tersebut Suzuki memiliki kesempatan untuk mengenal dan menjalin hubungan dengan Samuel Gompers (Bab III: 27). Suzuki Bunji bertujuan menjalankan organisasi buruh yang moderat dan stabil, serta mendedikasikan organisasinya untuk “menciptakan keharmonisan dan kerjasama di antara buruh dan kapitalis”. Ia berusaha menghindari munculnya nuansa sosialis dalam *Yūai Kai* agar dapat terhindar dari kecurigaan dan represi pemerintah yang membenci sosialisme (Ayusawa, 1976: 98-99 dan Marshall, 1967: 78-79).

Saya percaya bahwa buruh Jepang berbeda dengan buruh Eropa dan Amerika, paling tidak Amerika, secara kepribadian, karakter, dan emosi....Menurut saya hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan besar dalam karakter bangsa (*kokuminsei*). Di Barat yang terutama adalah individualisme, namun di Jepang kita memiliki tradisi kekeluargaan.... Oleh karena perbedaan yang mendasar ini terlihat dalam banyak dan berbagai bentuk, saya berpendapat bahwa perbedaan juga akan termanifestasikan dalam masalah perburuhan. (Marshall, 1967: 79)

Suzuki berpendapat bahwa kemajuan industri tergantung dari kerja sama dan keharmonisan antara buruh dan kapitalis. Berdasarkan hal tersebut ia menolak doktrin perjuangan kelas sosial yang dimiliki tokoh-tokoh buruh yang berhaluan marxis. “Kita tidak bisa berkeyakinan bahwa buruh akan dapat mencapai kesejahteraan dengan cara menjatuhkan kapitalis. Bila kita tidak bersatu dengan kapitalis akan mustahil untuk mengharapkan kesejahteraan yang sejati.” (Garon, 1967: 79).

Pada April 1917, *Yūai Kai* telah memiliki anggota lebih dari dua puluh ribu orang di seluruh Jepang, hal yang sangat luar biasa di tengah kebijakan pemerintah untuk merepresi gerakan buruh. Suzuki berjuang terus menerus untuk meyakinkan masyarakat dan pemerintah akan keuntungan sosial dan ekonomi dari kehadiran serikat-serikat buruh. Serikat buruh menurutnya dapat meningkatkan produktivitas dengan cara mengatur pasar tenaga kerja, melatih keterampilan-

keterampilan baru bagi buruh, dan meningkatkan “karakter moral buruh”. *Yūai Kai* yang berhaluan moderat mampu meyakinkan sejumlah kapitalis sehingga diijinkan untuk membentuk cabang-cabang lokal di dalam perusahaan mereka. *Yūai Kai* pada tahun 1919 berubah menjadi *Dai Nippon Rōdō Sōdōmei* (Federasi Buruh Jepang) dan makin aktif dalam melakukan kegiatannya.

Keberhasilan *Yūai Kai* juga mendorong para tokoh buruh lainnya untuk kembali aktif dan mendirikan serikat-serikat buruh seperti *Shinyu Kai* (serikat buruh percetakan), *Seishin Kai* (serikat buruh koran), dan *Kei Mei Kai* (organisasi guru sekolah dasar). Gerakan buruh yang pada dasarnya lemah saat itu ternyata dapat berbalik menggunakan ideologi nasionalisme dan patriotisme untuk terlindungi dari represi. Namun bukan berarti gerakan buruh Jepang berjalan dengan mulus. Pemerintah masih menganggap konflik buruh dan gerakan buruh hanya mengganggu stabilitas negara. Pemerintah masih mementingkan kaum kapitalis untuk dapat memajukan industri dan perekonomian di Jepang (Bab II: 19-25). Selain itu, pemerintah juga takut dengan pemikiran radikal berhaluan kiri yang terus berkembang di kalangan buruh.

Tabel 3.5: Konflik Buruh Pada Zaman Taishō

Tahun	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923
Kasus	50	64	108	378	417	497	282	246	250	270
Jumlah Partisipan (1000)	7.9	7.9	8.9	57.3	66.5	63.1	36.4	58.2	41.5	36.3

Sumber: *Teikoku tokeinenkan* (Silberman, 1974: 308)

Pada tahun 1917, kasus terkait konflik buruh meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan Perang Dunia I (1914-1918) telah membuat Jepang mengalami ledakan ekonomi sehingga para buruh pun menuntut penyesuaian terhadap upah mereka. Harga komoditas yang naik namun upah buruh yang tetap rendah telah menyebarkan rasa ketidakpuasan di antara buruh dan menimbulkan friksi antara buruh-manajemen industri. Pada tahun 1918,

harga beras yang tak terkendali menimbulkan serangkaian demonstrasi dan mogok kerja di seluruh Jepang. Rasa ketidakpuasan tersebut akhirnya berujung pada kerusuhan yang kemudian dikenal dengan sebutan *Kome Sōdō* (Kerusuhan Beras). Tak lama setelah Perang Dunia I berakhir, ledakan ekonomi Jepang disusul dengan resesi ekonomi dan yang paling terkena dampaknya adalah buruh. Ketidakpuasan di kalangan buruh pun bertambah dan kesuksesan *Revolusi Bolshevik* pada tahun 1918 di Rusia telah membuat sosialisme dan marxisme kembali populer di kalangan buruh untuk melakukan gerakan yang dapat melakukan revolusi sosial.

3.4 Radikalisme dan Perpecahan Dalam Gerakan Buruh

Pada tahun akhir tahun 1910an telah muncul sebuah gerakan buruh yang baru dan lebih militan di Jepang. Perubahan menuju pemikiran yang lebih radikal timbul oleh keraguan tentang apakah demokrasi dapat menjamin keharmonisan sosial dan kesatuan bangsa. *Revolusi Bolshevik* di Rusia telah meyakinkan mereka bahwa sosialisme adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Dengan demikian pemikiran sosialisme, marxisme, dan *anarchosindicalisme* mulai berkembang subur di antara para buruh.

Setelah Perang Dunia I, di Jepang terdapat dua ideologi yang saling bersaing, yaitu *anarchosindicalisme* dan marxisme. Suksesnya *Revolusi Bolshevik* di Rusia memberikan pengaruh yang sangat luar biasa di Jepang. Pemikiran radikal dalam gerakan buruh makin populer, ditambah dengan kebijakan pemerintah yang represif pada saat itu. Setelah Perang Dunia I kaum kapitalis makin makmur sedangkan kaum miskin makin bertambah sehingga jurang antara kaya dan miskin makin lebar.

Perbedaan mulai meruncing antara gerakan buruh yang berhaluan moderat dengan tokoh seperti Suzuki Bunji, dan yang berhaluan *archosindicalism* dengan tokoh seperti Osugi Sakae. Bahkan Suzuki Bunji mulai kehilangan pengaruhnya dalam *Sōdōmei* yang saat itu didominasi oleh pendukung radikalisme. Bagi para buruh yang dipengaruhi pemikiran *anarchosindicalisme*, kalangan moderat seperti Suzuki Bunji sudah tak berguna. Mereka menganggap bahwa revolusi

sosial jauh lebih penting daripada serikat buruh. Mereka menuntut agar gerakan buruh terus menerapkan aksi mogok kerja dan kekerasan untuk melakukan perubahan dan tidak sudi bernegosiasi dengan kapitalis. Banyak aksi buruh yang dipimpin kaum *anarchosyndicalis* berujung pada kerusuhan.

Aso Hisashi, seorang tokoh buruh, yang datang ke Tambang Besi Ashio untuk membantu meredakan kerusuhan demi kepentingan buruh tambang, malah diserang karena telah menghentikan kerusuhan di Ashio. Sementara itu, dalam mogok kerja di Galangan Kapal Kawasaki, Kobe, yang diikuti oleh 35.000 buruh, polisi harus mengendalikan situasi dengan menggunakan pedang untuk mengatasi para buruh yang terbakar emosi. Seorang buruh yang terlibat dalam aksi mogok tersebut terbunuh. Para buruh yang mogok akhirnya mengubah taktik dengan cara menduduki pabrik yang berlangsung selama satu bulan. Aksi-aksi seperti inilah yang terjadi di seluruh negeri yang digerakkan dan dipimpin oleh kaum *anarchosyndicalis* (Ayusawa, 1976: 141)

Namun terdapat juga kalangan radikal yang berbeda pendapat dengan kaum *anarchosyndicalis*, yang menyebut dirinya sebagai marxis atau *bolshevis* seperti Yamakawa Hitoshi. Mereka berpendapat bahwa dalam gerakan buruh harus dilakukan sentralisasi kekuatan dan semua aksi harus dikendalikan oleh pusat. Berbeda dengan *anarchosyndicalis* yang menghendaki desentralisasi dan tidak memiliki program yang jelas.

Namun kedua kelompok radikal ini sama-sama berpendapat bahwa hanya melalui para buruh dan perserikatannyalah, bukan melalui parlemen dan politik di pemerintahan, yang dapat menjatuhkan kaum kapitalis. Hanya kaum proletariat yang mampu melakukan revolusi sosial dan melalui pembebasan kelas pekerja tersebut maka akan terwujud persamaan bagi seluruh masyarakat.

Mulai tahun 1920, kaum *anarchosyndicalis* menjadi sangat berpengaruh dalam gerakan buruh di Jepang. *Anarchosyndicalis* berpendapat bahwa revolusi harus dilakukan secara spontan oleh semua kelas yang telah ditekan. Kaum kapitalis dapat dijatuhkan dengan perjuangan dan organisasi para buruh. Mereka menolak segala bentuk partisipasi dalam institusi borjuis. *Anarchosyndicalis*

memilih konfrontasi daripada konsiliasi, lebih memilih sabotase industri daripada membuat kesepakatan.

Pada tahun 1922, pengaruh *anarchosyndicalis* mulai melemah di kalangan buruh. Hal ini disebabkan kegagalan mereka untuk memberikan hasil yang nyata dari aksi konfrontasi melawan kaum kapitalis. Pukulan terakhir bagi kaum *anarchosyndicalis* adalah terbunuhnya pemimpin mereka, Osugi Sakae, tahun 1923. Akhir yang tragis dari Osugi menandai berakhirnya pengaruh *anarchosyndicalisme* dalam gerakan buruh Jepang. Posisi mereka sebagai pengaruh utama gerakan buruh digantikan oleh kaum komunis (marxis).

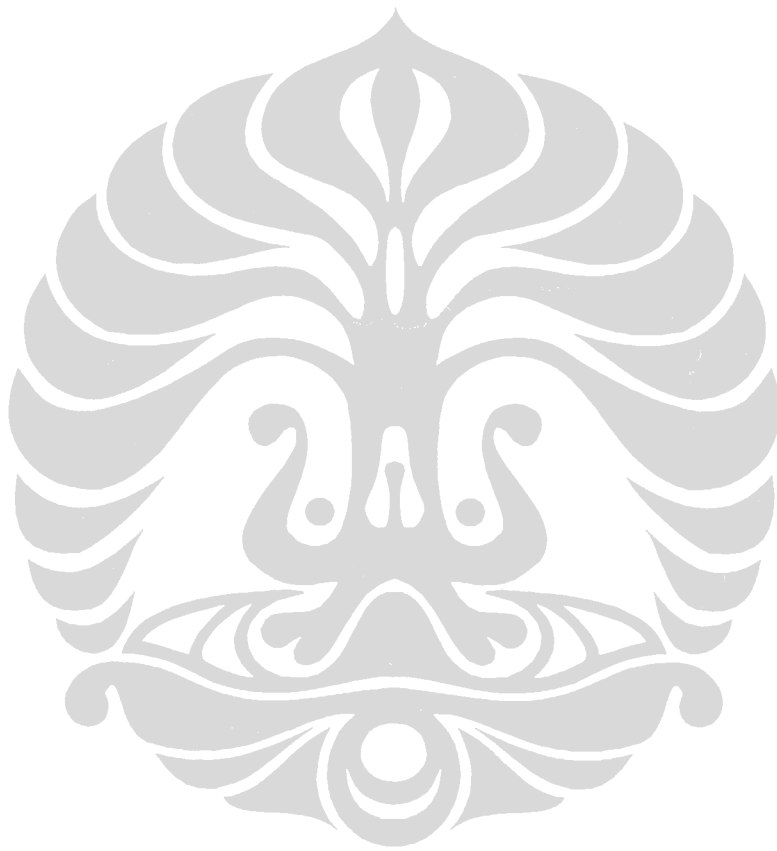
Tabel 3.6: Konflik Buruh dan Serikat Buruh

Tahun	Konflik Buruh			Serikat Buruh	
	Total	Diikuti dengan sabotase (Mogok, dll.)	Partisipan dari kelompok kiri	Jumlah	Anggota
1931	2,456	998	64,536	818	368,975
1932	2,217	893	54,783	932	377,625
1933	1,897	610	49,423	942	384,277
1934	1,915	626	49,536	965	387,964
1935	1,872	590	37,734	993	408,662
1936	1,975	547	30,900	973	420,589
1937	2,126	628	123,730	837	359,290
1938	1,020	262	18,341	731	375,191
1939	1,120	258	72,835	517	365,804
1940	718	226	32,160	49	9,455
1941	330	158	8,562	11	895

Sumber: *Rōdōshō*, Departemen Tenaga Kerja (Sumiya, 1966: 204)

Namun di dalam tubuh kaum komunis sendiri terjadi perpecahan. Terjadi perbedaan pendapat dalam menelaah dan menerapkan teori marxisme. Selain itu, friksi antara kelompok radikal kiri dengan kelompok kanan yang moderat juga terus berlanjut. Perpecahan di dalam gerakan buruh inilah yang turut

menyebabkan menghambat adanya kemajuan dalam usaha memperbaiki keadaan buruh di Jepang. Pada periode tersebut mereka lebih terfokus untuk memenangkan ideologinya masing-masing daripada membuat perubahan yang nyata.



BAB IV

PENGARUH ILO DI JEPANG

Berdirinya ILO (International Labor Organization) dapat dikatakan memberikan semangat baru bagi gerakan buruh di Jepang. Peran Jepang dalam dunia Internasional tanpa disangka ternyata memulai perubahan yang terjadi dalam masalah perburuhan di negaranya. Oleh karena itu, pertama-tama terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai sejarah berdirinya ILO dan bagaimana Jepang dapat mengambil peranan dalam organisasi tersebut.

4.1 Sejarah ILO

ILO (International Labor Organization) saat ini merupakan organisasi independen yang bekerja sama dengan PBB, bukan berada di bawah naungan PBB. ILO didirikan pada tahun 1919 setelah Perang Dunia I berakhir. ILO didirikan berdasarkan Perjanjian Versailles sebagai bagian dari Liga Bangsa-Bangsa. Walaupun akhirnya Liga Bangsa-bangsa (LBB) bubar sebelum Perang Dunia II, ILO dapat terus mempertahankan eksistensinya hingga saat ini (Ayusawa, 1976: 112).

ILO memiliki struktur yang unik karena terdiri dari tiga jenis perwakilan bagi tiap negara yaitu: buruh, pengusaha, dan pemerintah. Ketiga perwakilan tersebut berdiri sejajar di dalam struktur ILO. Motivasi awal didirikannya ILO bersifat humanitarian, didorong oleh gerakan buruh yang ada di Eropa dan Amerika Serikat (AS) untuk memperbaiki keadaan mereka. Selain itu, jumlah buruh yang terus meningkat karena industrialisasi akan menyebabkan keresahan sosial dan berujung pada revolusi sosial jika tidak dilakukan usaha-usaha untuk memperbaiki kondisi mereka ("ILO History", 2000).

4.2 Jepang & ILO

Jepang mengikuti Konferensi Perdamaian di Paris (1919), yang menghasilkan Perjanjian Versailles, sebagai salah satu pemenang dari Perang Dunia I. Ketika perwakilan Jepang menghadiri Konferensi tersebut, mereka terkejut ketika ditanya siapakah diantara anggota delegasi Jepang yang mewakili serikat buruh Jepang. Ternyata pemimpin-pemimpin buruh dari negara-negara lain akan turut berpartisipasi dalam konferensi tersebut. Akhirnya Suzuki Bunji, pemimpin dari serikat buruh *Yūai Kai* yang merupakan salah satu serikat buruh terbesar di Jepang saat itu, dipanggil untuk datang ke Paris. Namun Suzuki pada kenyataannya tidak pernah dipanggil untuk menghadiri konferensi tersebut karena pemerintah Jepang tidak tertarik untuk ikut membahas permasalahan buruh.

Tugas utama perwakilan Jepang dalam Konferensi Perdamaian di Paris adalah untuk mempertahankan kepentingan dan status Jepang dalam dunia internasional. Bahkan dapat dikatakan bahwa pemerintah Jepang sama sekali tidak menyadari bahwa berdirinya ILO, di luar dugaan, akan memberikan pengaruh bagi keadaan domestik Jepang. Dalam LBB dan ILO, Jepang memperoleh status sebagai salah satu anggota tetap Dewan Eksekutif dan memiliki hak veto dalam sidang LBB. Pengakuan Jepang di dunia internasional sebagai salah satu negara adi daya adalah hal yang diimpikan Jepang sejak puluhan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, bergabungnya Jepang dalam ILO dianggap perlu dan masih bisa ditoleransi karena Jepang diberikan kelonggaran waktu untuk meratifikasi hukumnya mengenai perlindungan buruh sesuai Perjanjian Versailles.

4.3 Usaha Mengubah Kebijakan Pemerintah Jepang Melalui Pengaruh ILO

Walaupun Suzuki Bunji tidak diikutsertakan dalam Konferensi Perdamaian di Paris, Ia kembali ke Jepang dengan memiliki informasi bahwa salah satu isi dalam Perjanjian Versailles yang turut disetujui dan ditandatangani Jepang adalah pendirian ILO. Ia juga mengetahui bahwa ILO akan mengadakan konferensi pertamanya di Washington, AS pada bulan Oktober-November 1919 dan bahwa semua negara yang menandatangani Perjanjian Versailles akan hadir,

termasuk Jepang. Konferensi ILO tersebut akan dihadiri oleh tiga jenis perwakilan dari tiap negara, yaitu: dua orang mewakili pemerintah, satu mewakili pengusaha dan satu mewakili buruh.

Dalam salah satu Pasal dalam Perjanjian Versailles, telah diatur bagaimana prosedur pemilihan perwakilan untuk pengusaha dan buruh. Berdasarkan Pasal 389 Konstitusi ILO, disebutkan bahwa perwakilan buruh dan pengusaha “dipilih berdasarkan organisasi-organisasi industri, jika ada, yang paling mewakili kalangan pengusaha atau buruh (berdasarkan jenis perwakilannya) di negara tersebut.” Seharusnya Suzuki Bunji sebagai presiden *Yūai Kai*, serikat buruh terbesar di Jepang saat itu, yang mewakili buruh. Namun pemerintah Jepang memilih seorang Kepala Insinyur dalam Galangan Kapal Kawasaki yang bernama Matsumoto Uhei (Ayusawa, 1976: 122 dan Harari, 1973: 32).

Berbagai protes dari buruh atas keputusan tersebut bermunculan di Tokyo, Osaka dan pusat-pusat industri lainnya. Serikat-serikat buruh bersatu menentang pemilihan tersebut. Surat-surat protes dikirim kepada pemimpin konferensi ILO. Suzuki Bunji pun meminta pertolongan dari Samuel Gompers (Bab III: 38) karena perwakilan buruh Jepang untuk konferensi ILO hanyalah “boneka” pemerintah Jepang.

Pada konferensi ILO tahun 1919 di Washington, AS, Jepang dipermalukan dengan protes yang diwakili oleh Corneille Mertens, perwakilan buruh dari Belgia, bahwa wakil buruh dari Jepang tidak dipilih dengan ketentuan yang sudah disepakati sebelumnya dan meminta konferensi mendorong pemerintah Jepang untuk menjamin kebebasan dan hak-hak serikat buruh. Karena Matsumoto gagal memperoleh dukungan suara mayoritas dalam konferensi, maka ia didiskualifikasi dari konferensi. Bahkan yang membuat perwakilan Jepang makin tercoreng mukanya adalah wakil pengusaha Jepang, Muto Sanji, dicabut hak suaranya dalam pengambilan keputusan konferensi.

Dalam sidang paripurna konferensi ILO pada tanggal 27 September, Matsumoto, sebelum ia secara resmi didiskualifikasi dari konferensi, memberikan pidato yang mengejutkan bagi pemerintah Jepang. Matsumoto dalam pidatonya malah mengekspos keadaan buruh di Jepang dan mengkritik kebijakan pemerintah

Jepang yang merepresi gerakan buruh. Pada akhir konferensi ILO yang pertama tersebut diberikan teguran agar di masa depan perwakilan buruh Jepang dipilih dengan persetujuan dari serikat-serikat buruh yang ada di Jepang (Ayusawa, 1976: 125-126; Harari 1983: 34).

Pada tiga konferensi ILO berikutnya pada tahun 1921, 1922, dan 1923, pemerintah Jepang kembali dipermalukan di hadapan wakil-wakil negara lainnya karena wakil buruh Jepang yang tidak sesuai. Bahkan wakil-wakil buruh Jepang yang dikirim ke ketiga konferensi tersebut kembali mengikuti contoh tindakan Matsumoto Uhei memberikan pidato yang mengkritik kebijakan pemerintah Jepang di hadapan sidang. Para buruh terus melancarkan protes atas kebijakan pemerintah Jepang dan pada konferensi ILO tahun 1922, salah seorang tokoh buruh Jepang bernama Tanahashi Kitora berhasil mendapatkan kesempatan untuk berbicara di konferensi walaupun ia bukan wakil resmi Jepang untuk memprotes kebijakan pemerintahnya (Ayusawa, 1976: 127-130).

Wakil pemerintah Jepang dalam konferensi ILO tahun 1923, Dr Adachi Mineichiro dan Maeda Tamon, memberikan laporan hasil konferensinya kepada Perdana Menteri Jepang yang menjelaskan bahwa “telah berkembang sentimen negatif terhadap Jepang dalam konferensi ILO yang sudah tidak dapat diacuhkan lagi” (Ayusawa, 1976: 130). Akhirnya setelah berkali-kali dipermalukan di hadapan dunia internasional, pemerintah Jepang pun menuruti teguran ILO dan pada konferensi ILO tahun 1924 mengirim Suzuki Bunji sebagai wakil buruh Jepang.

Para buruh di Jepang memiliki sikap yang berbeda-beda dan kompleks terhadap efektifitas dari ILO dalam mempengaruhi keadaan domestik Jepang. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan ideologi di kalangan buruh Jepang. Sebagian tokoh buruh di Jepang yang berhaluan kanan (moderat) memiliki harapan yang besar terhadap ILO, namun mengalami kekecewaan pada empat tahun pertama ILO berdiri karena tidak adanya perhatian dan dukungan yang berarti bagi penyelesaian masalah perburuhan di Jepang. Walau begitu mereka terus berjuang agar ILO dapat membantu memberikan perubahan yang positif bagi keadaan buruh di Jepang.

Sementara itu, aktivis buruh yang berhaluan kiri selalu bersikap skeptis terhadap keberadaan ILO, bahkan menentang partisipasi kaum buruh Jepang di ILO. Mereka menganggap ILO sebagai sebuah organisasi internasional untuk “mengharmoniskan masyarakat” dan bertentangan dengan ideologi mereka yang berpegang pada revolusi kaum proletariat yang akan menjatuhkan kaum kapitalis. Bahkan kebijakan pemerintah untuk tidak menyertakan buruh dalam delegasi Jepang bagi ILO makin membuat para aktivis buruh menyetujui pandangan kalangan radikal buruh yang skeptis dengan keberadaan ILO dan melemahkan serikat-serikat buruh yang moderat. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan pemerintah yang hendak menekan berkembangnya radikalisme dan pemikiran sosialis di Jepang.

Terbentuknya kabinet Partai Buruh di Inggris untuk pertama kalinya pada Januari 1924 semakin membuat kalangan moderat buruh di atas angin terhadap kelompok radikal buruh di Jepang. Kejadian ini membuktikan argumen kaum moderat seperti Suzuki Bunji bahwa kerja sama dengan para reformis borjuis di Parlemen untuk mengeluarkan hukum perburuhan akan memberikan keuntungan secara jangka panjang. Serikat-serikat buruh seperti *Sōdōmei* kembali menjauhkan dirinya dari pemikiran komunis dan bergiat kembali untuk mendorong persamaan hak pilih dan kegiatan di parlemen. Kelompok moderat kembali menjadi penggerak utama dalam gerakan buruh di Jepang. Sebagian besar serikat buruh di Jepang juga kembali mendukung keterlibatan buruh di ILO.

Menyadari perubahan situasi dalam gerakan buruh Jepang dan teguran yang diberikan ILO, pada tanggal 15 Februari 1924 kabinet Kiyoura Keigo menyetujui proposal Biro Sosial untuk mengakui serikat-serikat buruh besar yang beranggotakan lebih dari seribu orang sebagai blok pemilih tunggal dalam penentuan perwakilan buruh Jepang untuk konferensi ILO. Walau begitu, keputusan tersebut mendapat tentangan dari Departemen Agrikultur dan Perdagangan serta Militer Jepang.

Menurut Ehad Harari (1973: 36-39), sikap baru pemerintah Jepang mungkin juga dipengaruhi oleh kekhawatiran pemerintah terhadap meluasnya ideologi *anarchosyndicalism* dan *Bolshevist* serta perpecahan di kalangan buruh

antara kaum radikal dengan kaum moderat. Sehingga pemerintah Jepang berpendapat lebih baik untuk mendukung dan bekerja sama dengan kaum moderat buruh agar dukungan terhadap kaum radikal dapat ditekan. Hal ini menyebabkan berubahnya pandangan mayoritas aktivis buruh dari radikalisme menjadi realisme, dari penekanan terhadap revolusi menjadi penekanan terhadap reformasi hukum.

Walaupun demikian, tak dapat dipungkiri bahwa kejadian yang memalukan Jepang dalam konferensi-konferensi awal ILO di saat Jepang sedang mencari pengakuan dan status di dunia internasional turut membuat Jepang berpikir ulang mengenai kebijakannya di bidang perburuhan. Selain itu, status Jepang sebagai salah satu anggota dewan ILO sebagai pengakuan bahwa Jepang adalah salah satu dari delapan negara industri maju saat itu mau tak mau membuat Jepang harus mengikuti segala kebijakan dan keputusan ILO. Walau Jepang dapat membuat ILO untuk memberikan kelonggaran waktu dalam meratifikasi hukum perburuhan, namun Jepang pada akhirnya harus tetap menyesuaikan standar kebijakan perburuhannya dengan kebijakan ILO.

4.4. Pengaruh ILO Terhadap Perburuhan di Jepang

Memang benar bahwa keputusan dan rekomendasi yang dikeluarkan ILO tidak mengikat Jepang untuk segera mematuhi hal tersebut. Namun harus diakui bahwa setelah berkali-kali menghadapi situasi yang memalukan pada konferensi ILO telah membuat pemerintah menyadari bahwa mereka harus melakukan perbaikan terhadap kondisi buruh karena status dan tanggung jawab Jepang sebagai salah satu anggota tetap Dewan Eksekutif ILO. Selain itu, pemerintah yang mulai memahami posisi yang dimiliki oleh serikat buruh dalam masyarakat industri menyimpulkan bahwa lebih baik untuk memberikan toleransi dan mendorong bertumbuhnya gerakan buruh secara sehat daripada merepresinya sehingga timbul radikalisme dan tindakan anarki.

4.4.1 Perkembangan Hukum Mengenai Perburuhan

Mengikuti ketetapan yang telah diputuskan oleh ILO, maka pemerintah Jepang turut merevisi Undang-Undang Pabrik tahun 1911 dan diresmikan pada 29 maret 1923. Undang-Undang tersebut berlaku untuk perusahaan yang mempekerjakan lebih dari sepuluh orang atau mempekerjakan kurang dari sepuluh orang namun menggunakan mesin bertenaga listrik. Anak usia sepuluh hingga dua belas tahun hanya diperbolehkan untuk bekerja pekerjaan ringan. Khusus untuk buruh tambang, yang diperbolehkan bekerja adalah anak yang berusia di atas dua belas tahun. Selain itu, perlindungan untuk buruh perempuan dan anak di bawah usia enam belas tahun yang mengatur jam kerja dan kerja malam mulai diberlakukan secara bertahap. Pembatasan jam kerja pun menjadi delapan jam sehari dan empat puluh jam seminggu bagi seluruh buruh, baik pria maupun perempuan dengan minimal dua puluh empat jam istirahat setiap minggunya. Besarnya penghasilan buruh dan prosedur pembayarannya turut diatur dalam revisi Undang-undang ini. UU Pabrik dan UU Pertambangan mengalami perbaikan untuk terakhir kalinya sebelum Perang Dunia II pada tahun 1929 (Ayusawa, 1976: 183-201, 230; Sugeno, 1992: 7).

Peraturan mengenai Kontrol Perekrutan Buruh dikeluarkan pada tahun 1924 yang mengatur bahwa agen-agen tenaga kerja harus menjelaskan terlebih dahulu kondisi tempat di mana para buruh akan dipekerjakan sebelum penandatanganan kontrak. Perempuan dari pedesaan adalah korban yang paling sering dijadikan sasaran penipuan oleh para agen dan pengusaha. Berbagai langkah diambil oleh pemerintah untuk mencegah agar tidak ada agen maupun pengusaha yang melakukan penipuan seperti peraturan ini.

Sebenarnya telah diresmikan Undang-Undang Asuransi Kesehatan yang diumumkan pada bulan November 1922, bersamaan dengan didirikannya Biro Urusan Sosial yang bertugas untuk menjalankan Undang-Undang tersebut. Namun karena lobi kalangan kaum kapitalis kepada pemerintah untuk menunda pelaksanaan hukum ini, baru pada tahun 1926 Undang-Undang ini dapat dijalankan secara efektif. Tanggung jawab yang ditawarkan oleh asuransi kesehatan pemerintah ini adalah perawatan ketika sakit, perawatan ketika cedera,

ganti rugi kematian dan ganti rugi bagi keluarga buruh yang meninggal dunia. Sumber finansial bagi asuransi ini berasal dari subsidi pemerintah, kontribusi pengusaha dan kontribusi buruh (Ayusawa, 1976: 209).

Pada tahun 1925 pemerintah Jepang akhirnya mencabut *Chian Keisatsu Hō* (Bab III: 32-33). Hal ini memberikan kebebasan bagi buruh untuk berorganisasi tanpa takut mengalami represi. Pemerintah pada tahun yang sama mengeluarkan *Chian Iji Hō* (UU Pemeliharaan Kedamaian) untuk mengganti *Chian Keisatsu Hō* yang telah dihapus, namun UU yang baru tersebut lebih ditujukan untuk menekan kelompok sayap kiri yang dianggap mengancam stabilitas negara. Sementara itu, gerakan buruh dan serikat-serikat buruh secara umum di Jepang dapat berjalan tanpa kekangan pemerintah.

Bahkan pemerintah sejak tahun 1919 mulai menyusun Rancangan Undang-Undang Serikat Buruh menyusul resolusi yang dikeluarkan Komisi Kerja yang bertugas untuk mempelajari permasalahan buruh untuk memberikan kesempatan bagi serikat-serikat buruh bertumbuh secara alami (Ayusawa, 1976: 219).

Penyusunan RUU ini berlangsung hingga tahun 1931 karena sikap pemerintah yang masih mewaspadaai gerakan buruh yang dianggap dapat mengganggu stabilitas nasional. Selain itu tugas penyusunan RUU ini yang semula diemban oleh Departemen Agrikultur dan Perdagangan dialihkan kepada kepada Biro Urusan Sosial pada tahun 1925. Walaupun begitu, berita penyusunan RUU menimbulkan antusiasme di kalangan buruh setelah segala represi yang dilakukan pemerintah sejak awal Meiji.

Sayangnya penyusunan RUU ini terhenti karena tertahan di tingkat Majelis Tinggi, Parlemen Jepang. Penentangan Majelis Tinggi Jepang tersebut didorong oleh kaum kapitalis menentang RUU tersebut. Bahkan kaum kapitalis menjadi bersatu dan membentuk *Zensanren* (*Zenkoku Sangyō Dantai Rengōkai*, Federasi Nasional bagi Organisasi-organisasi Industri) tahun 1931 khusus untuk menentang penetapan RUU ini. Kaum Kapitalis secara keras terus menentang karena peresmian RUU ini dianggap dapat menempatkan kaum buruh di atas angin dan berganti menekan kaum kapitalis.

4.4.2 Pengaruh ILO Terhadap Administrasi Buruh di Jepang

Dalam hal administrasi buruh oleh pemerintah, Jepang menjadi negara yang paling nyata dan efektif mendapat pengaruh dari ILO. Pada tanggal 1 November 1922 pemerintah membentuk biro baru bernama Biro Urusan Sosial di bawah Departemen Dalam Negeri yang khusus mengurus administrasi buruh. Dilihat dari tugas dan tujuannya, dapat dikatakan bahwa biro ini sebagai pelopor Departemen Perburuhan di Jepang. Bahkan bila dibandingkan, posisinya tak dapat dibandingkan dengan biro-biro lain di bawah Departemen Dalam Negeri. “Direktur Jenderal Biro Urusan Sosial dapat disamakan tingkat jabatannya dengan Menteri” (Ayusawa, 1976: 172-173).

Selain itu, setiap pemerintah prefektur diberikan tanggung jawab untuk melakukan dan mengawasi administrasi buruh di wilayahnya masing-masing. Inspektur pabrik dan petugas mediasi konflik buruh digabung dengan departemen kepolisian di setiap prefektur. Pemerintah prefetur juga harus melaksanakan semua Hukum dan Perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah pusat mengenai perburuhan (Ayusawa, 1979: 174).

Departemen Komunikasi bertanggung jawab atas perlindungan pelaut. Wilayah Jepang dibagi menjadi tujuh distrik bagi administrasi maritim dengan biro-biro maritim lokal di Tokyo, Osaka, Hiroshima, Kumamoto, Sendai, dan Sapporo. Sementara itu, pengawasan atas pertambangan adalah di bawah tanggung jawab Departemen Perdagangan dan Industri. Jepang dibagi menjadi lima distrik pertambangan dengan biro-biro pengawasan di Tokyo, Osaka, Fukuoka, Sendai, dan Sapporo. Namun biro-biro tersebut berada di bawah supervisi Departemen Dalam Negeri terkait pelaksanaan hukum bagi perlindungan buruh tambang. Dengan demikian tugas dari administrasi buruh terpusat pada Departemen Dalam Negeri (Ayusawa, 1976: 174-175).

Diagram 4.1: Struktur administrasi buruh di pemerintah pusat



Sumber: Ayusawa, "A History of Labor in Modern Japan", 1976, h. 173.

Dengan pengaruh dari ILO, pemerintah Jepang sudah mulai dapat menata administrasi perburuhan secara lebih baik dan efisien setelah sebelumnya tugas tersebut tersebar di bawah beberapa departemen sehingga menyebabkan tanggung jawab tugas menjadi tumpang tindih dan tidak efisien. Dengan stuktur administrasi yang baru, kerja pemerintah dalam hal perburuhan menjadi lebih terkoordinasi dan kohesif. Selain itu, secara tak langsung hal ini juga akan membantu dalam mendorong perkembangan industri dan perekonomian Jepang.

4.5 Perkembangan Perburuhan Selanjutnya Hingga Sebelum Perang Pasifik

Mulai periode tahun 1930an, Jepang mengalami perang yang berkepanjangan dan hal ini turut mempengaruhi perkembangan perburuhan di Jepang. Masa peperangan ini dimulai dengan "Insiden Manchuria" pada tahun 1931, berlanjut menjadi perang Cina-Jepang yang kedua (1937), dan diakhiri dengan Perang Pasifik (1941-1945) yang menjadi bagian dari Perang Dunia II. Hal ini terjadi karena melalui serangkaian kejadian, kekuasaan politik di Jepang jatuh di tangan militer tahun 1931. Karena kebijakan militernya, Jepang

mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan dari segala bentuk kerja sama internasional. Pada tahun 1933, Jepang keluar dari LBB dan diikuti dengan keluarnya Jepang dari ILO pada tahun 1938

Setelah kesuksesan Insiden Manchuria, industri militer Jepang untuk sementara waktu meraih keuntungan besar dan buruh pun turut menikmati hasilnya. Pengangguran berkurang, upah meningkat, dan industri makin berkembang. Sebagai akibatnya, anggota serikat-serikat buruh meningkat dan pada tahun 1936 mencapai puncaknya dengan total 420.589 anggota. Karena keadaan perekonomian yang sedang bagus, jumlah konflik buruh pun berkurang sejak Insiden Manchuria (1931) hingga tahun 1935. Selain itu, mogok kerja dan partisipannya makin berkurang dari tahun ke tahun seperti yang terlihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1: Kekuatan Serikat Buruh dan Konflik Buruh (1931-1944)

Tahun	Konflik Buruh	Mogok Kerja dan Sabotase lainnya	Partisipan	Serikat Buruh	Anggota
1931	2,456	993	64,536	818	368,975
1932	2,217	893	54,783	932	377,625
1933	1,897	610	45,423	942	384,277
1934	1,915	626	49,536	965	387,964
1935	1,872	590	37,734	993	408,662
1936	1,975	547	30,900	973	420,589
1937	2,126	628	123,730	837	359,290
1938	1,050	262	18,341	731	375,191
1939	1,120	258	72,835	517	365,804
1940	718	226	32,160	49	9,455
1941	330	158	8,562	11	895
1942	259	166	9,029	3	111
1943	417	279	9,418	3	155
1944	236	216	6,627	0	0

Sumber: Suehiro, "Nihon Rōdō Kumiai Undō Shi," h. 73 (Ayusawa, 1976: 228)

Walau demikian, industri non militer mengalami kemunduran drastis. Penyakit dan kasus kecelakaan yang dialami buruh pun berlipat ganda. Menurunnya kondisi tempat kerja berujung pada meningkat kembalinya konflik buruh tahun 1936-1937 (Tabel 4.1). Menghadapi masalah ini, pemerintah yang dikuasai militer makin mengencangkan kontrolnya terhadap perekonomian Jepang. Seperti yang dialami negara-negara lain di tengah peperangan, kelas buruh/pekerjalah yang menanggung beban terberat. Buruh kehilangan kebebasannya dalam menentukan pekerjaannya, harga meningkat tajam di tengah upah buruh yang di bawah pengawasan ketat pemerintah. Akibat yang tak terhindarkan lagi adalah bertambah banyaknya konflik buruh dan meluasnya kegelisahan publik.

Sudah sewajarnya apabila para buruh menunjukkan perlawanan terhadap memburuknya keadaan mereka. Pada tahun 1934, *Rōdō Kumiai Sō-Hyōgi Kai* (Dewan Umum Perserikatan Buruh) yang berhaluan kiri namun masih mentaati batasan-batasan dari pemerintah bergabung dengan *Nippon Rōdō Kurabu Haigeki Dōmei* (Liga untuk Memperjuangkan Klub Buruh Jepang) membentuk *Nippon Rōdō Kumiai Zenkoku Hyōgikai* (Dewan Nasional bagi Perserikatan Buruh Jepang). Namun organisasi tersebut diperintahkan untuk membubarkan diri pada tahun 1937 oleh pemerintah. Serikat-serikat buruh lainnya juga berusaha untuk bersatu menentang kebijakan pemerintah namun ketika perintah untuk membentuk *Sanpō* diberikan pemerintah, serikat-serikat buruh akhirnya terpaksa membubarkan diri. *Sōdōmei*, serikat buruh yang paling lama bertahan, akhirnya pun bubar pada tahun 1940 setelah bertahan selama 28 tahun semenjak pertama kali dibentuk sebagai *Yūai Kai* pada tahun 1912 (Ayusawa, 1976: 228-229).

Pada tahun 1937, polisi kembali menjadi unsur utama dalam mengendalikan konflik buruh, memaksa para buruh untuk menerima konsiliasi oleh polisi atau “konsiliasi dengan pedang” (*Saberu Chōtei*). Yasoji Kazahaya, seorang jurnalis, memberikan observasi:

Di dalam pabrik-pabrik persenjataan besar, tidak hanya ada larangan secara *de facto* tentang konflik buruh, namun kontak

langsung dan negosiasi antara manajemen dan buruh juga dilarang. Pemerintah selalu masuk sebagai penengah. Resolusi bagi konflik dikerjakan oleh manajemen dan polisi dan kemudian diberikan kepada perwakilan buruh. Tidak ada transaksi bilateral ekonomi yang setara antara manajemen dan buruh. Pihak ketiga, yang lebih berkuasa dan lebih tinggi kedudukannya daripada kedua pihak utama, yang menyelesaikan konflik dengan memberikan ketentuan-ketentuan yang tidak dapat diganggu gugat. (Duss, 1997: 640).

Sanpō adalah singkatan dari *Sangyō Hōkoku Kai* (Masyarakat Industri Patriotik). Organisasi ini dibentuk oleh pemerintah untuk menjamin kerja sama manajemen industri dan buruh di seluruh pabrik di Jepang untuk mendukung pelaksanaan perang secara efektif. Pada Agustus 1938, pemerintah pusat memerintahkan agar setiap pemerintahan prefektur membentuk *Sanpō* di daerahnya masing-masing. Dengan berdirinya *Sanpō*, pemerintah mendesak agar seluruh serikat buruh membubarkan diri dan bergabung dalam organisasi tersebut. Bahkan organisasi para kapitalis juga diharuskan bubar dan bergabung dalam *Sanpō*. Dengan menggunakan slogan *Jigyō Ikka* (Keluarga Perusahaan), *Sanpō* bertujuan agar buruh dan perusahaan dapat bekerja bersama secara harmonis untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai kemenangan dalam perang. Pada tahun 1940-1941, *Sanpō* memiliki 19.060 organisasi di seluruh Jepang dengan anggota total mencapai lebih dari tiga juta orang (Ayusawa, 1976: 229-230)

Seperti yang terlihat pada Tabel 4.1 (Hal. 54), pada tahun 1944 akhirnya seluruh serikat-serikat buruh yang ada di Jepang secara resmi telah membubarkan diri. *Sanpō* memang berhasil menghapus serikat-serikat buruh di Jepang, namun ia tak berhasil menekan kasus konflik-konflik buruh yang terjadi secara signifikan. Meski demikian, pemerintah akhirnya menyadari bahwa buruh adalah salah satu elemen penting dalam industri sehingga keadaannya pun harus diperhatikan. Hukum mengenai perburuhan di masa perang tetap mengalami perkembangan positif, walaupun tidak dapat dianggap sebagai perkembangan yang besar.

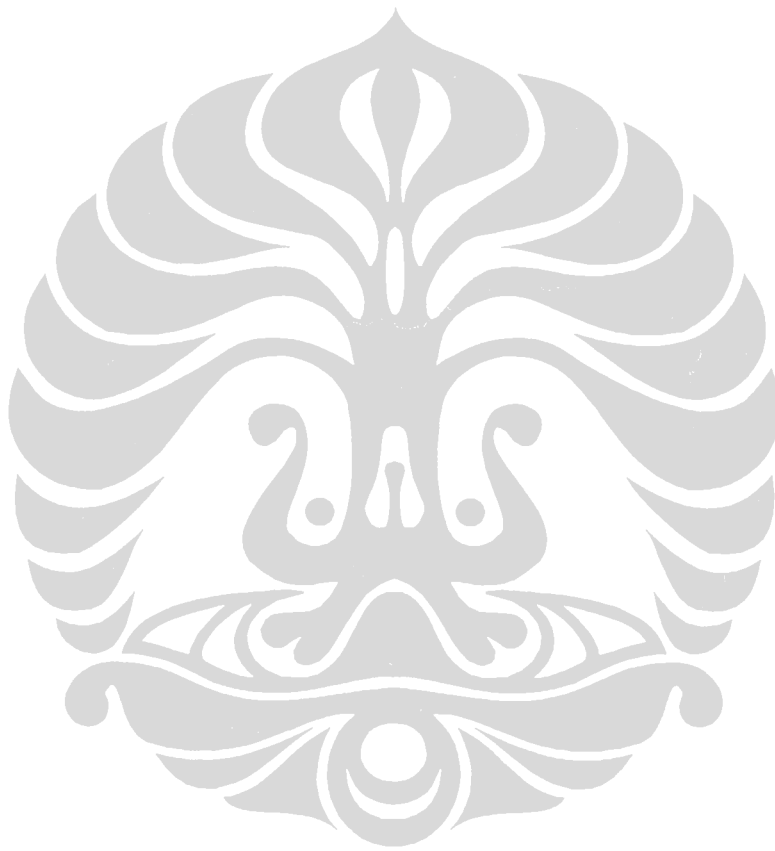
Pada tahun 1931, kompensasi bagi buruh juga dilegalkan tak hanya bagi buruh pabrik dan tambang namun berlaku juga bagi buruh konstruksi dan transportasi. Selain itu, pemerintah juga menetapkan *Shōten Hō* (UU Pertokoan Komersial) tahun 1938 yang melindungi pegawai pertokoan komersial secara

hukum. Pada tahun yang sama pemerintah juga mendirikan Departemen Kesejahteraan yang melakukan berbagai perbaikan terkait kondisi kerja. Contohnya adalah peraturan pada tahun 1938 yang membatasi waktu kerja hanya dua belas jam sehari untuk menghindari kelelahan para buruh. Namun hal itu dan peraturan lain yang dikeluarkan oleh Departemen Kesejahteraan lebih merupakan demi kepentingan perang bukan karena alasan kemanusiaan ataupun perlindungan buruh. Asuransi bagi para buruh pun mengalami perbaikan dengan *Kokumin Kenkō Hoken Hō* (UU Asuransi Kesehatan Nasional) pada tahun 1938, diikuti dengan *Sen-in Hoken Hō* (UU Asuransi Pelaut) tahun 1939 dan *Rōdōsha Nenkin Hoken Hō* (UU Asuransi Pensiun Buruh) tahun 1940. Dua UU terakhir adalah UU yang pertama kalinya di Jepang yang mengatur pensiun bagi orang cacat dan lansia, walaupun jumlah uang yang diberikan masih sangat kecil dibandingkan di negara-negara di Eropa dan Amerika (Ayusawa, 1976: 230-231)

Pada masa periode perang tersebut, pemerintah Jepang mulai lebih memperhatikan keadaan para buruh. Walaupun sebagian kebijakan yang dibuatnya adalah demi kesuksesan peperangan, namun tak dapat dipungkiri bahwa kebijakan tersebut juga memberikan kontribusi bagi perbaikan keadaan buruh. Selain itu, UU seperti *Shōten Hō* yang tidak terkait dengan kepentingan peperangan dan UU mengenai asuransi yang walaupun kecil jumlahnya namun turut menunjukkan perkembangan keadaan buruh menuju arah yang lebih positif dibanding sebelumnya.

Memang hal ini terlihat tidak berarti jika dibandingkan dengan perkembangan keadaan buruh setelah Perang Dunia II, namun dapat dilihat berdasarkan uraian diatas bahwa sebenarnya pemerintah Jepang sudah mulai dapat mentolerir gerakan buruh dan bahwa perbaikan keadaan buruh juga merupakan demi kepentingan nasional. Walaupun pada akhirnya gerakan buruh beserta serikat-serikat buruh menghilang, namun hal tersebut lebih dikarenakan usaha pemerintah untuk menciptakan keadaan yang mampu menyokong mobilisasi militer dan kampanye perang Jepang. Oleh karena itu, bahkan organisasi-organisasi kaum kapitalis seperti *Zensanren* juga ikut dipaksa pemerintah untuk bubar dan bergabung dalam *Sanpō*.

Walaupun Jepang hanya menjadi anggota ILO pada tahun 1919-1938 dan akhirnya keluar karena kebijakan militerisme yang diambilnya, namun ILO turut memberikan pengaruh dalam kebijakan pemerintah untuk mengakui keberadaan serikat-serikat buruh di Jepang dan mulai menerapkan kebijakan untuk memperbaiki keadaan buruh di Jepang melalui legislasi tentang perburuhan dan pembaharuan struktur administrasi buruh. Jepang kemudian kembali secara resmi menjadi anggota ILO pada tanggal 26 November 1951.



BAB V

KESIMPULAN

Dari uraian dan analisa dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa belum adanya hukum yang mengatur perburuhan menyebabkan para buruh dengan mudah dapat dieksploitasi oleh kaum kapitalis. Kebijakan *laissez-faire* pemerintah Jepang digunakan untuk mengeksploitasi buruh tanpa menghiraukan hak-hak individu. Masalah dalam perburuhan inilah yang akhirnya menjadi *shakai mondai* (masalah sosial) yang terjadi di seluruh penjuru Jepang pada masa itu.

Kealpaan hukum perburuhan yang berakibat pada eksploitasi buruh dan masalah sosial yang terjadi mendorong munculnya ketidakpuasan di kalangan buruh dan melahirkan gerakan buruh Jepang. Dengan semakin meningkatnya jumlah buruh yang terdidik, mereka menjadi makin sadar akan besarnya nilai mereka. Kebijakan pemerintah Jepang menghadapi konflik buruh menekankan pada tindakan represif untuk memaksa terciptanya kedisiplinan, kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Tindakan drastis yang diambil pemerintah Jepang tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas negara. Namun, sikap pemerintah Jepang sendiri yang represif dan memandang negatif gerakan buruh Jepang itulah yang menimbulkan radikalisme dalam gerakan buruh di Jepang.

Pengaruh ILO terhadap perburuhan di Jepang memberikan pengaruh yang signifikan dalam perubahan dinamika perburuhan di Jepang. Dalam LBB dan ILO, Jepang memperoleh status sebagai salah satu anggota tetap Dewan Eksekutif dan memiliki hak veto dalam sidang LBB. Pengakuan Jepang di dunia internasional sebagai salah satu negara adi daya adalah hal yang diimpikan Jepang sejak awal. Oleh karena itu, bergabungnya Jepang dalam ILO dianggap perlu dan masih ditoleransi karena Jepang diberikan kelonggaran waktu untuk meratifikasi

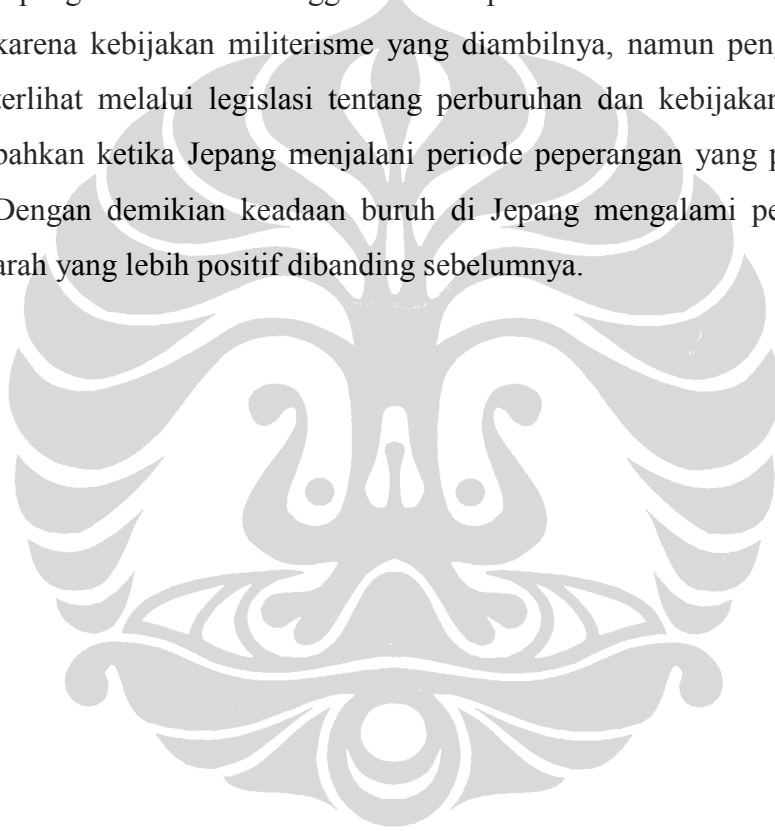
hukumnya mengenai perlindungan buruh sesuai Perjanjian Versailles dan Konstitusi ILO.

Walaupun pemerintah selalu berusaha merepresi gerakan buruh, kebijakan pemerintah sedikit demi sedikit dapat diubah seiring dengan pengaruh ILO dan keinginan pemerintah Jepang untuk mempertahankan statusnya di mata internasional. Berubahnya sikap pemerintah sehingga wakil buruh bagi ILO akhirnya dipilih dari serikat-serikat buruh menunjukkan secara tak langsung bahwa pemerintah mengakui keberadaan mereka. Hal ini menyebabkan berubahnya pandangan mayoritas aktivis buruh dari radikalisme menjadi realisme, dari penekanan terhadap revolusi sosial menjadi penekanan terhadap reformasi hukum.

Selain itu, walaupun Jepang dapat membuat ILO untuk memberikan kelonggaran waktu dalam meratifikasi hukum perburuhan, namun Jepang pada akhirnya tetap harus menyesuaikan standar kebijakan perburuhannya dengan kebijakan ILO. Harus diakui bahwa setelah berkali-kali menghadapi situasi yang memalukan dalam konferensi-konferensi ILO telah membuat pemerintah menyadari bahwa mereka harus melakukan perbaikan terhadap kondisi buruh karena status dan tanggung jawab Jepang sebagai salah satu anggota tetap Dewan Eksekutif ILO. Terlebih pemerintah mulai memahami posisi yang dimiliki oleh serikat buruh dalam masyarakat industri, menyimpulkan bahwa lebih baik untuk memberikan toleransi dan mendorong bertumbuhnya gerakan buruh secara sehat daripada merepresinya sehingga timbul radikalisme dan tindakan anarki.

Sejak bergabung dengan ILO, pemerintah Jepang banyak mengeluarkan legislasi tentang perburuhan yang melindungi para buruh, meski banyak dari legislasi tersebut yang mendapat perlawanan dari kaum kapitalis sehingga isinya terpaksa direvisi menjadi lebih lemah. Administrasi buruh di Jepang pun mendapatkan perhatian yang lebih baik karena pengaruh Konvensi ILO. Dengan pengaruh dari ILO, pemerintah Jepang sudah mulai dapat menata administrasi perburuhan secara lebih efisien setelah sebelumnya tugas tersebut tersebar di bawah beberapa departemen sehingga menyebabkan tanggung jawab tugas menjadi tumpang tindih dan tidak efisien.

Usaha tak kenal lelah gerakan buruh Jepang untuk memprotes ketidakadilan dan represi yang dilakukan pemerintah melalui ILO akhirnya memberikan hasil, walaupun perubahan kebijakan pemerintah Jepang terjadi secara bertahap dan terus menghadapi tantangan dari kalangan kapitalis. Memang hal ini terlihat tidak berarti jika dibandingkan dengan perkembangan keadaan buruh setelah Perang Dunia II, namun dapat dilihat bahwa sebenarnya pemerintah Jepang sudah mulai dapat mentolerir gerakan buruh dan menyadari bahwa perbaikan keadaan buruh juga merupakan demi kepentingan nasional. Walaupun Jepang keluar dari keanggotaan ILO pada tahun 1938 sebelum Perang Dunia II karena kebijakan militerisme yang diambilnya, namun pengaruh dari ILO terus terlihat melalui legislasi tentang perburuhan dan kebijakan pemerintah lainnya bahkan ketika Jepang menjalani periode peperangan yang panjang (1931-1945). Dengan demikian keadaan buruh di Jepang mengalami perkembangan menuju arah yang lebih positif dibanding sebelumnya.

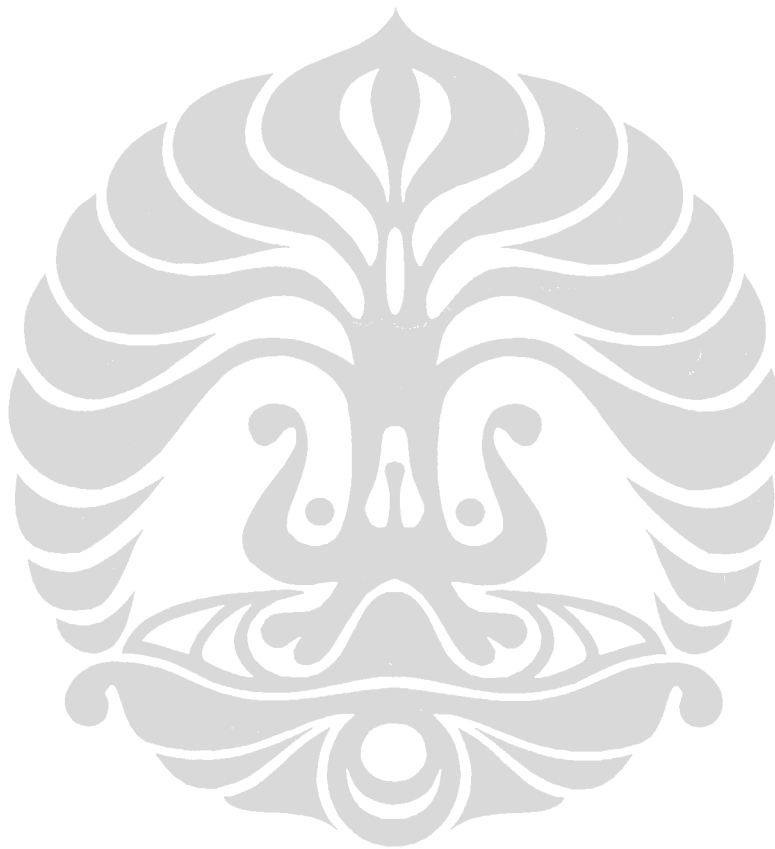


DAFTAR PUSTAKA

- Ayusawa, Iwao F.. (1976) *A History of Labor in Modern Japan*. (Ed. ke-2). Connecticut: Greenwood Press.
- Bowen, Roger W.. (1980). *Rebellion and Democracy in Meiji Japan: A Study of Commoners in the Popular Rights Movement*. Berkeley: University of California Press.
- Campbell, Alan, et al. (ed.). (1998). *Japan: The Illustrated Encyclopedia*. Tokyo: Kodansha.
- Cole, Robert E.. (1971). *Japanese Blue Collar: The Changing Tradition*. (Ed. ke-2). Berkeley: University of California Press.
- Duss, Peter (ed.). (1997). *The Cambridge History of Japan Volume 6: The Twentieth Century*. (Ed. ke-5). Cambridge: Cambridge University Press.
- Fujimoto, Takeshi. (1979). *Rōdō Jikan*. (ed. ke-17). Tokyo: Iwanami Shoten.
- Garon, Sheldon. (1987) *The State and Labor in Modern Japan*. Berkeley: University of California Press.
- Gordon, Andrew. (1988). *The Evolution of Labor Relations in Japan*. (Ed. ke-2). Cambridge: Council of East Asian Studies, Harvard University.
- Harari, Ehud. (1973). *The Politics of Labor Legislation in Japan: National-International Interaction*. Berkeley: University of California Press.
- Izuru, Shinmura. (ed.). (1992). *Kōjiten*. (ed. Ke-4). Tokyo: Iwanami Shoten.
- Jansen, Marius B.. (ed.). (1996). *The Cambridge History of Japan Volume 5: The Nineteenth Century*. (ed. ke-4). Cambridge: Cambridge University Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Ed. Ke-2). (1991). Jakarta: Balai Pustaka.
- Marshall, Byron K.. (1967) *Capitalism and Nationalism in Prewar Japan: The Ideology of Business Elite, 1868-1941*. Stanford: Stanford University.
- Marsland, Stephen E.. (1989). *The Birth of the Japanese Labor Movement: Takano Fusataro and the Rōdō Kumiai Kiseikai*. Honolulu: University of Hawaii Press.

- Neilson, William Allan. (1951). *Webster's New Dictionary of The English Language*. (Ed. Ke-2). Springfield: G. & C. Merriam Company.
- Okochi, Kazuo; Bernard Karsh dan Solomon B. Levine. (ed.). (1973). *Worker & Employers in Japan: The Japanese Employment Relation System*. Tokyo: University of Tokyo Press.
- Sako, Mari dan Hiroki Sato. (1997). *Japanese Labour and Management in Transition: Diversity, Flexibility, and Participation*. New York: Routledge.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. (1991). Jakarta: Modern English Press.
- Scalapino, Robert A.. (1983). *The Early Japanese Labor Movement: Labor and Politics in a Developing Society*. Berkeley: University of California Press.
- Silberman, Bernard S. dan S. D. Harootunian (ed.). (1974). *Japan in Crisis: Essays on Taishō Democracy*. Princeton: Princeton University Press.
- Sugeno, Kazuo. (1992). *Japanese Labor Law*. (Terj. Leo Kanowitz). Tokyo: University of Tokyo Press.
- Sumiya, Mikio dan Koji Taira. (ed.). (1979). *An Outline of Japanese Economic History 1603-1940: Major Works and Research Findings*. Tokyo: University of Tokyo Press.
- . (1969). *Rōdō Keizairon*. Tokyo: Keizaigaku Zenshu 19.
- . (1966). *Nihon no Rōdō Mondai*. (ed. ke-3). Tokyo: Tokyo Daigaku Shuppan Kai.
- Suzuki, Makoto. (ed.). (1995). *Daijisen*. Tokyo: Shogakukan.
- Woodiwiss, Anthony. (1992). *Law, Labour and Society in Japan: From Repression to Reluctant Recognition*. New York: Routledge.
- Wray, William D.. (ed.). (1989). *Managing Industrial Enterprise, Cases From Japan's Prewar Experience*. Cambridge: The Council of East Asian Studies / Harvard University.
- “Censorship in Japan.” <http://www.bookmice.net/darkchilde/japan/essay1.html> (13 Maret 2008).
- Kazuo, Nimura. “The Historical Characteristics of Labor relations in Japan.” <http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/nk/eg-hischarjlr.html> (23 Mei 2007).
- Takano, Fusataro. “Labor Movement in Japan.” <http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/nk/ftreport-lmj.html> (23 Mei 2007).

- Takano, Fusataro. "The War and Labor in Japan."
<http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/nk/ftreport-war.html> (23 Mei 2007).
- "ILO History." (26 Okt. 2000).
<http://www.ilo.org/public/english/about/history.htm> (9 Apr. 2007).
- "Peace Preservation Law." (27 Maret 2003)
http://everything2.com/index.pl?node_id=1384129 (13 Maret 2008).



DAFTAR ISTILAH

AFL (American Federation of Labor)
Federasi Buruh Amerika

Anarchosyndicalisme

Bentuk gabungan dari Anarchy dan Syndicalism. Paham yang menentang pemerintah dan semua institusi milik kapitalis dengan menggunakan cara sabotase dan kekerasan. Ingin menjatuhkan kapitalisme melalui revolusi sosial yang dilakukan kelas proletariat.

Bakufu (ぼくふ 幕府)

Keshogunan. Pemerintah feodal Jepang.

Bolshevist

Penganut paham bolshevik yang radikal dan bertujuan untuk menjatuhkan kapitalisme dengan cara kekerasan.

Borjuis

Kelas sosial menengah keatas.

Bunmei Kaika (ぶんめいかいか 文明開化)

Peradaban dan Pencerahan.

Chian Iji Hō (ちあんいじほう 治安維持法)

Undang-Undang Pemeliharaan Kedamaian (1925).

Chian Keisatsu Hō (ちあんけいさつほう 治安警察法)

Undang-Undang Ketertiban Publik (1900).

Chinsen Ki (ちんせんき 沈潜期)

Periode Tenggelam (1900-1912).

Chōwa (ちやうわ 調和)

Harmoni.

Dai Nippon Rōdō Sōdōmei (だいにっぽんろうどうそうどうめい 大日本労働総同盟)

Federasi Buruh Jepang.

Dai Nippon Teikoku Kenpou ^{だいにっぽんていこくけんぽう} (大日本帝国憲法)
Undang-Undang Dasar Meiji (1889).

De facto

Menurut hakikat; menurut kenyataan yang sesungguhnya.

De jure

Berdasarkan hukum.

Demokrasi

(1) Sistem pemerintah yang seluruh rakyatnya turut serta dalam memerintah dengan perantara wakilnya; pemerintahan rakyat. (2) Pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Dōmei Higyō ^{どうめいひぎょう} (同盟罷業)
Mogok kerja.

Fukoku Kyōhei ^{ふこくきょうへい} (富国強兵)
Negara Kaya, Militer Kuat.

Gyōsei Shikkō Hō ^{ぎょうせいしっこうほう} (行政執行法)
Undang-Undang Kegiatan Administratif (1900)

Humanitarian

Sikap yang memperhatikan dan berusaha mempromosikan kesejahteraan sesamanya.

ILO (International Labor Organization)
Organisasi Buruh Internasional.

Imperialisme

Paham yang menghendaki pendirian atau perluasan kekaisaran, dengan menduduki atau membentuk koloni di negara lain dan berusaha untuk menguasai politik dan pemerintahannya.

Industrialisasi

Usaha menggalakkan industri di suatu negara.

Jigyō Ikka ^{じぎょういっか} (事業一家)
Keluarga Perusahaan.

Jiyū Minken Undō ^{じゅうみんけんうんどう} (自由民権運動)
Gerakan Kebebasan dan Hak-hak sipil.

Jiyūtō (自由党)

Partai Liberal. Salah satu partai politik di Jepang.

Kapitalisme

Sistem perekonomian yang alat-alat produksi dan distribusi dimiliki secara pribadi dan dijalankan untuk memperoleh keuntungan, dengan ciri persaingan dalam pasaran bebas.

Kappanko Kumiai (活版子組合)

Serikat Buruh Percetakan.

Kasōmin (下層民)

Orang yang rendah.

Kasō Shakai (下層社会)

Masyarakat strata bawah.

Kei Mei Kai

Organisasi guru sekolah dasar.

Kigyōka (企業家)

Pengusaha. Orang yang membangun perusahaan dan melakukan manajemen perusahaannya.

Kizoku In (貴族院)

Majelis Tinggi.

Kokumin Kenkō Hoken Hō (国民健康保険法)

Undang-Undang Asuransi Kesehatan Nasional (1938).

Kokuminsei (国民性)

Karakter Bangsa

Kolonialisme

Penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu.

Kome Sōdō (米騒動)

Kerusuhan Beras.

Komunisme

Paham yang menganut ajaran Karl Marx dan Friedrich Engels yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara.

Konvensi

Ketentuan yang dibuat dalam suatu rapat dan disetujui bersama oleh semua anggota rapat untuk dilaksanakan.

Kōjō Chōsakari (工場調査仮)

Badan Survey Pabrik.

Laissez-faire

Sistem perekonomian pasar bebas.

Liberal

Mempunyai cara pandang yang bebas dalam arti luas dan terbuka.

Marxisme

Paham sosialisme yang dikembangkan oleh Karl Marx.

Meiji (明治)

Nama Kaisar Jepang dan era kekuasaannya (1868-1912).

Meiji Ishin (明治維新)

Restorasi Meiji (Pembaharuan Meiji).

Militerisme

Paham yang mendasarkan kekuatan militer sebagai pendukung kekuasaan; pemerintah dikuasai oleh golongan militer; pemerintah yang mengatur negara secara militer.

Moderat

(1) Pandangan atau sikap selalu menghindari perilaku yang ekstrim. (2) Pandangan atau sikap cenderung ke arah dimensi atau mengambil jalan tengah.

Nihon Shakai Seisaku Gakkai (日本社会政策学会)

Asosiasi Kebijakan Sosial Jepang.

Nippon Rōdō Kumiai Zenkoku Hyōgikai (日本労働組合全国評議会)

Dewan Nasional bagi Perserikatan Buruh Jepang.

Nippon Rōdō Kurabu Haigeki Dōmei

Liga untuk Memperjuangkan Klub Buruh Jepang.

Nittetsu Kyoseikai

Serikat Teknisi Kereta Api.

Paradoks

Hal yang seolah-olah berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran.

Paternalisme

Sistem kepemimpinan yang berdasarkan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin seperti hubungan antara ayah dan anak.

Philanthropy

Semangat atau sikap untuk secara aktif melakukan kebaikan kepada sesama manusia.

Proletariat

(1) Lapisan masyarakat paling rendah. (2) Golongan buruh yang hidup dari menjual tenaga.

Radikalisme

Sikap ekstrem dalam suatu pemikiran. Paham yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan kekerasan.

Restorasi Meiji

Peristiwa jatuhnya Keshogunan Tokugawa dan dikembalikannya kekuasaan negara pada Kaisar Jepang (1868).

Revolusi Bolshevik

Revolusi yang menjatuhkan monarki di Rusia tahun 1918 oleh kaum Bolshevik, suatu sayap politik radikal, dan mendirikan negara komunis.

Rōdō (労働)

Perburuhan. (1) Perkerjaan yang menggunakan badan (fisik). Bekerja menggunakan fisik dan intelektualitas demi mendapat penghasilan. (2) Kegiatan penuh usaha manusia yang bertujuan pada produksi. Kegiatan manusia dalam menciptakan peralatan hidup dan produksi yang berasal dari alam. Memakai tenaga fisik.

Rōdō Mondai (労働問題)

Masalah perburuhan. Berbagai masalah sosial yang terjadi karena konflik antara buruh dengan kapitalis dalam masyarakat kapitalisme.

Rōdōsha (労働者)

Buruh. (1) Orang yang hidup dengan gaji dan upah sebagai tenaga kerja. (2) Orang yang mendapat penghasilan hidup dengan melakukan pekerjaan fisik.

Rōdōsha Nenkin Hoken Ho (労働者年金保険法)

Undang-Undang Asuransi Pensiun Buruh (1940).

Rōdō Kumiai (労働組合)

Serikat buruh. Para buruh yang berdasarkan inisiatif sendiri bersatu dan berorganisasi demi perbaikan status sosial serta untuk menjaga dan

memperbaiki keadaan buruh. Bentuk strukturnya dapat berupa organisasi umum maupun organisasi yang dibentuk berdasarkan perusahaan, profesi, dan industri.

Rōdō Kumiai Kisei Kai (労働組合期成会)

Perkumpulan untuk Mempromosikan Serikat Buruh.

Rōdō Kumiai Sō-Hyōgi Kai (労働組合総評議会)

Dewan Umum Perserikatan Buruh.

Rōdō Sekai (労働世界)

Dunia Perburuhan. Jurnal yang rutin diterbitkan oleh Rōdō Kumiai Kisei Kai.

Rōdō Undō (労働運動)

Gerakan buruh.

Saberu Chōtei (サーベル調停)

Konsiliasi dengan pedang.

Saimin

Orang miskin.

Seishin Kai

Serikat buruh koran

Seiyūkai (政友会)

Salah satu partai politik di Jepang.

Sanpō (Sangyō Hōkoku Kai, 産業報国会)

Masyarakat Industri Patriotik.

Sen-in Hoken Hō (船員保険法)

Undang-Undang Asuransi Pelaut (1939).

Shakai Mondai (社会問題)

Masalah sosial. Segala macam masalah yang terjadi karena kekurangan (ketimpangan) sosial yang tidak masuk akal sehingga menyebabkan kesulitan dalam kehidupan masyarakat

Shakai Seisaku (社会政策)

Kebijakan sosial.

Shihonka (しほんか 資本家)

Kapitalis. Orang yang menawarkan modal bagi perusahaan. Kapitalis dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya sebagai orang yang bertanggung jawab langsung atas manajemen; dan orang yang semata-mata hanya mendapatkan bagian dari keuntungan dan tak berhubungan secara langsung dengan manajemen.

Shinyu Kai

serikat buruh percetakan.

Shokkō Jijō (しよっこうじじょう 職事情)

Keadaan buruh. Merupakan laporan hasil survey pemerintah tentang perburuhan pada tahun 1903.

Shokkō Giyu Kai (しよっこうぎゆうかい 職工義勇会)

Perkumpulan Ksatria Buruh.

Shokusan Kōgyō (しよくさんこうぎょう 殖産興業)

Ekspansi Industri dan Mengembangkan Ekonomi.

Shōten Hō (しようてんほう 商店法)

Undang-Undang Pertokoan Komersial (1938).

Shōwa (しよわ 昭和)

Nama Kaisar Jepang dan era kekuasaannya (1926-1988).

Shūgi In (しゅうぎいん 衆議院)

Majelis Rendah.

Jukuren Rōdō (じゅくれんろうどう 熟練労働)

Buruh yang terlatih dan memiliki keterampilan.

Sosialisme

Paham bahwa semua harta benda, industri dan perusahaan adalah milik negara.

Taishō (たいしょう 大正)

Nama Kaisar Jepang dan era kekuasaannya (1912-1926).

Taishō Ishin (たいしょういしん 大正維新)

Pembaharuan Taishō.

Tekkō Kumiai (てっこうくみあい 鉄鋼組合)

Serikat Buruh Pabrik Besi.

Tennō (てんのう 天皇)
Kaisar Jepang.

Tokkō Keisatsu (とっこうけいさつ 特高警察)
Polisi Khusus.

Tōyō Jiyū Tō (とうようじゆうとう 東洋自由党)
Partai Oriental Liberal

Yūai Kai (ゆうあいかい 友愛会)
Perkumpulan Cinta Persahabatan.

Zensanren (ぜんこくさんぎょうだんたいれんごうかい Zenkoku Sangyō Dantai Rengōkai, 全国産業団体連合会)
Federasi Nasional bagi Organisasi-organisasi Industri.

